LAPORAN

KINERJA KBRI MUSCAT

Tahun 2025









KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya Laporan Kinerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Muscat Tahun 2025 dapat diselesaikan. Dokumen ini disusun sebagai laporan atas pelaksanaan tugas dan fungsi KBRI Muscat dalam mendukung arah dan pelaksanaan kebijakan luar negeri Republik Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2025-2029 dan diturunkan ke dalam Renstra KBRI Muscat tahun 2025-2029.

Sejalan dengan tujuan KBRI Muscat yang tertera pada Renstra dimaksud, pada tahun 2025, KBRI Muscat telah melaksanakan program dan kegiatan untuk memenuhi tujuan dimaksud terkait peningkatan diplomasi ekonomi Indonesia, peningkatan kualitas pelayanan dan pelindungan WNI, meningkatkan keterlibatan aktif diaspora Indonesia, dan memperkuat postur diplomasi Indonesia.

Tujuan dimaksud telah dituangkan ke dalam 9 Sasaran Strategis sepanjang tahun 2025 dengan pencapaian realisasi Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) senilai 104,02 dengan predikat Istimewa.

Dalam pelaksanaannya, KBRI Muscat menghadapi sejumlah tantangan, antara lain dinamika politik dan ekonomi kawasan Timur Tengah yang terus berkembang, keterbatasan sumber daya, serta berbagai kendala teknis dalam implementasi program. Menyikapi hal tersebut, KBRI Muscat melakukan langkah-langkah penyesuaian dan mitigasi risiko melalui penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Capaian kinerja yang diraih merupakan hasil sinergi dan dedikasi seluruh jajaran KBRI Muscat, dengan dukungan dari mitra kerja terkait. Untuk itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama dan dukungan yang telah diberikan.

Sebagai penutup, kami berharap Laporan Kinerja tahun 2025 ini dapat menjadi sarana evaluasi yang objektif dan konstruktif, serta menjadi dasar dalam upaya peningkatan kinerja KBRI Muscat di masa mendatang.

Duta Besar RI Muscat

Mohamad Irzan Djohan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
DAFTAR TABEL 4
DAFTAR GAMBAR 7
RINGKASAN EKSEKUTIF 9
BAB I PENDAHULUAN 12
I.1 Latar Belakang 12
I.2 Aspek Strategis 13
BAB II PERENCANAAN KINERJA 21
II.1 Rencana Strategis 21
II.1 Visi 21
II.2 Misi 21
II.3 Tujuan 21
II.2 Perjanjian Kinerja 22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 28
III.1 Capaian Kinerja 28
Stakeholder Perspective 31
Analisis IK S1.1 32
Analisis IK S1.2 41
Analisis IK S1.3 47
Analisis IK S2.1 52
Analisis IK C1.1 57
Analisis IK C1.2 64
Analisis IK C1.3 68
Internal Business Process Perspective 71
Analisis IK B1.1 72
Analisis IK B1.2 76
Analisis IK B2.1 80
Analisis IK B2.2 83
Analisis IK B3.1 87
Learning and Growth Perspective 92
Analisis IK L1.1 92

Analisis IK L2.1 97
Analisis IK L3.1 101
Efisiensi Sumber Daya Manusia 103
Sarana dan Prasarana yang Mendukung 104
Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Kinerja Kemenlu 105
BAB IV PENUTUP 109

DAFTAR TABEL

TabeI III.1 Capaian IK S1.1 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi KBRI Muscat.....34

Tabel III.2 Target, Realisasi, dan Capaian IK Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi KBRI Muscat.....35

Tabel III.3 Capaian IK S1.2 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI Muscat.....43

Tabel III.4 Target, Realisasi, dan Capaian IK Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI Muscat.....44

Tabel III.5 Capaian IK S1.3 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Negara Akreditasi KBRI Muscat.....48

Tabel III.6 Target, Realisasi, dan Capaian IK Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Negara Akreditasi KBRI Muscat.....49

Tabel III.7 Capaian IK S2.1 Indeks citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Muscat.....53

Tabel III.8 Target, Realisasi, dan Capaian IK Indeks citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Muscat.....54

Tabel III.9 Capaian IK C1.1 Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Muscat yang diselesaikan.....58

Tabel III.10 Target, Realisasi, dan Capaian IK Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Muscat yang diselesaikan.....59

Tabel III.11 Capaian IK C1.2 Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI Muscat.....66

Tabel III.12 Target, Realisasi, dan Capaian IK Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI Muscat.....66

Tabel III.13 Capaian IK C1.3 Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI KBRI Muscat.....69

Tabel III.14 Target, Realisasi, dan Capaian IK Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI KBRI Muscat.....70

Tabel III.15 Capaian IK B1.1 Jumlah kesepakatan yang dihasilkan dengan negara akreditasi KBRI Muscat.....73

Tabel III.16 Target, Realisasi, dan Capaian IK Jumlah kesepakatan yang dihasilkan dengan negara akreditasi KBRI Muscat.....73

Tabel III.17 Capaian IK B1.2 Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan.....76

Tabel III.18 Target, Realisasi, dan Capaian IK Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan.....77

Tabel III.19 Capaian IK B2.1 Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Muscat yang terverifikasi di Portal Peduli WNI.....81

Tabel III.20 Target, Realisasi, dan Capaian IK Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Muscat yang terverifikasi di Portal Peduli WNI.....81

Tabel III.21 Capaian IK B2.2 Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang Negara Akreditasi KBRI Muscat.....84

Tabel III.22 Target, Realisasi, dan Capaian IK Laporan Data Economic Intelligence tentang Negara Akreditasi KBRI Muscat.....85

Tabel III.23 Capaian IK B3.1 Persentase Impresi Engagement Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat pada KBRI Muscat.....89

Tabel III.24 Target, Realisasi, dan Capaian IK Persentase Impresi Engagement Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat pada KBRI Muscat.....89

Tabel III.25 Capaian IK L1.1 Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Muscat.....94

Tabel III.26 Target, Realisasi, dan Capaian IK Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Muscat.....95

Tabel III.27 Capaian IK L2.1 Indeks pengelolaan BMN KBRI Muscat.....99

Tabel III.28 Target, Realisasi, dan Capaian IK Indeks pengelolaan BMN KBRI Muscat.....100

Tabel III.29 Capaian IK L3.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KBRI Muscat.....101

Tabel III.30 Target, Realisasi, dan Capaian IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KBRI Muscat.....102

Tabel III.31 Pemenuhan Formasi Pegawai berdasarkan kebutuhan Organisasi.104

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1……41

Gambar III.2……41

Gambar III.3……42

Gambar III.4……46

Gambar III.5……47

Gambar III.6……50

Gambar III.7……51

Gambar III.8……51

Gambar III.9……55

Gambar III.10……56

Gambar III.11……63

Gambar III.12……63

Gambar III.13……64

Gambar III.14……75

Gambar III.15……75

Gambar III.16……91

Gambar III.17……91

Gambar III.18……92

Gambar III.19……79

Gambar III.20……87

Gambar III.21……95

Gambar III.22……96

Gambar III.23……96

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tabel Perbandingan NCKO selama periode 2023 - 2025

	2023	2024	2025
Nilai Capaian Kinerja Organisasi	**98,47 (Baik)**	**103,80 (Istimewa)**	**104,02 (Istimewa)**

Tabel Bobot dan Skor Tiap Perspektif

Perspektif	Bobot Perspektif	Skor Perspektif
Stakeholder Perspective	25%	109,50
Customer Perspective	15%	103,70
Internal Business Process Perspective	30%	102,63
Learning and Growth Perspective	30%	101,00
NCKO 2025	**104,27**	

NCKO KBRI Muscat dengan predikat Istimewa pada tahun 2025 diperoleh berdasarkan capaian masing-masing IKU yang sebagian besar telah memenuhi target. NCKO tahun 2025 yang diperoleh KBRI Muscat yaitu 104,51 dengan predikat istimewa. NCKO tahun 2025 yang diperoleh KBRI Muscat mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Adapun capaian masing-masing sasaran strategis dan IKU secara ringkas sebagai berikut:

- ***S1. Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KBRI Muscat yang Optimal dengan capaian 110,21*** *dilengkapi oleh S1.1. Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Muscat dengan capaian 113,90; S1.2. Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI Muscat dengan capaian 113,64; dan S1.3. Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Muscat dengan capaian 103,09.*

- ***S2. Citra Positif Indonesia di Negara Akreditasi KBRI Muscat yang meningkat dengan capaian 108,78*** *dilengkapi oleh S2.1. Indeks Citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Muscat dengan capaian 108,78.*

- ***C1. Pelindungan WNI dan pelayanan publik KBRI Muscat yang prima dengan capaian 103,70*** *dilengkapi oleh C1.1. Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Muscat yang diselesaikan dengan capaian 111,11; C1.2. Nilai persepsi kepuasaan pelayanan kekonsuleran KBRI Muscat dengan capaian 100,00; dan C1.3. Nilai persepsi pelayanan pelindungan WNI KBRI Muscat dengan capaian 100,00.*

- ***B1. Diplomasi Bilateral di Negara Akreditasi KBRI Muscat yang Kuat dengan capaian 100,00*** *dilengkapi oleh B1.1. Jumlah kesepakatan yang dihasilkan dengan negara akreditasi KBRI Muscat dengan capaian 100,00 dan B1.2. Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan dengan capaian 100,00.*

- ***B2. Basis Data KBRI Muscat yang Akurat dengan capaian 100,76*** *dilengkapi oleh B2.1. Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Muscat yang terverifikasi di Portal Peduli WNI dengan capaian 100,00 dan B2.2. Nilai laporan data Economic Intelligence/Market Intelligence tentang negara akreditasi KBRI Muscat dengan capaian 102,22.*

- ***B3. Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri KBRI Muscat yang Kuat*** *dilengkapi oleh B3.1. Persentase Impresi Engagement Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat pada KBRI Muscat dengan capaian 107,14.*

- ***L1. Tata Kelola Organisasi KBRI Muscat yang Baik dengan capaian 102,70*** *dilengkapi oleh L1.1. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Muscat dengan capaian 102,70.*

- ***L2. Pengelolaan Aset KBRI Muscat yang Optimal dengan capaian 93,51*** *dilengkapi oleh L2.1. Indeks Pengelolaaan BMN KBRI Muscat dengan capaian 93,51.*

- ***L3. Pengelolaan Anggaran KBRI Muscat yang Optimal dan Akuntabel dengan capaian 106,78*** *dilengkapi oleh L3.1. Nilai IKPA KBRI Muscat dengan capaian 106,78.*

BAB I
PENDAHULUAN









BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Hubungan diplomatik Indonesia dan Kesultanan Oman secara resmi dibuka pada tahun 1978. Kesultanan Oman pada saat itu menjadi wilayah tugas rangkapan dari Kedutaan Besar RI di Teheran, Republik Islam Iran. Pada tahun 1983, tugas rangkapan tersebut dialihkan kepada Kedutaan Besar RI di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi. Selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2011, Kedutaan Besar RI (KBRI) untuk Kesultanan Oman yang berkedudukan di Muscat secara resmi dibuka. Pembukaan KBRI Muscat, yang disusul dengan pembukaan Kedutaan Besar Kesultanan Oman di Jakarta pada September 2013, menandai babak baru hubungan Indonesia – Kesultanan Oman. Sejak saat itu berbagai upaya untuk memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara dilakukan secara lebih intensif melalui peningkatan kerja sama di berbagai bidang.

KBRI Muscat memiliki posisi penting dalam mendukung pelaksanaan diplomasi Indonesia di kawasan Timur Tengah, khususnya dalam mengimplementasikan kebijakan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia. Melalui mandat yang diemban, KBRI Muscat berperan sebagai perwakilan utama dalam mengartikulasikan dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di wilayah akreditasi, yaitu Kesultanan Oman dan Republik Yaman. Peran tersebut diwujudkan melalui penguatan kerja sama bilateral di berbagai sektor strategis, meliputi politik dan keamanan, perdagangan, investasi, pariwisata, serta pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan penguatan peran diaspora Indonesia sebagai bagian dari prioritas nasional.

Keberadaan komunitas WNI dalam jumlah yang signifikan di Oman dan Yaman semakin mempertegas arti penting KBRI Muscat. Sekitar 6.000 WNI di Oman dan 4.891 WNI di Yaman tidak hanya menjadi subjek pelindungan, tetapi juga mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi diplomasi dan peningkatan hubungan bilateral. Selain itu, diaspora Indonesia di kedua negara tersebut berperan sebagai penghubung yang berkontribusi terhadap penguatan citra Indonesia serta pembangunan nasional.

Hubungan bilateral yang stabil dan konstruktif antara Indonesia dengan Kesultanan Oman dan Republik Yaman menjadi modal utama bagi KBRI Muscat dalam mengembangkan kerja sama lintas sektor. Landasan hubungan yang kuat ini memungkinkan perluasan kolaborasi di bidang politik, keamanan dan pertahanan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, serta peningkatan interaksi antar masyarakat.
Pada tahun 2025, KBRI Muscat secara aktif menjalin sinergi dengan kementerian, lembaga pemerintah, dan para pemangku kepentingan terkait di

Indonesia dalam melaksanakan berbagai inisiatif diplomasi. Seluruh kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat kemitraan bilateral dengan Oman dan Yaman, pelindungan WNI, serta memastikan terwujudnya kepentingan nasional Indonesia secara berkelanjutan.

I.2 Aspek Strategis

POLITIK

OMAN

Hubungan politik RI-Oman berada dalam kondisi yang sangat baik pada tahun 2025. Dalam tahun 2025, Konsultasi Politik Kedua antara Indonesia dan Oman telah dilaksanakan di Muscat. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, Muhammad Anis Matta sedangkan Pemerintah Oman diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Sheikh Khalifa Alharthy. Dalam konspol kali ini, telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas Indonesia-Oman. Terkait sejumlah perjanjian yang masih dalam tahap pembahasan, kedua negara terus melakukan penyempurnaan berbagai konsep perjanjian

Hubungan bilateral di bidang pertahanan berjalan dengan baik. KBRI Muscat telah menyambut pasukan penjaga perdamaian UNIFIL di Lebanon yang akan kembali ke Indonesia dan berangkat ke Lebanon yaitu KRI Sultan Iskandar Muda-367 dan KRI Diponegoro-365 yang telah singgah di Salalah bulan Januari 2025 untuk *harbour service* dan *refueling* serta melakukan *courtesy call* kepada Salalah *Navy Commander.* KBRI Muscat juga telah mendampingi Atase Pertahanan KBRI Riyadh dalam pelaksanaan *courtesy call* dengan Panglima Angkatan Darat Kesultanan Oman.

YAMAN

Meskipun situasi politik dan keamanan di Yaman belum stabil, tapi hubungan antara Indonesia dengan Yaman berjalan dinamis sepanjang tahun 2025. Pada bulan September 2025, dalam kunjungan KBRI Muscat ke Yaman, KBRI Muscat telah melaksanakan pertemuan dengan Perdana Menteri Yaman dan Menteri Luar Negeri Yaman untuk silaturahmi dan pembahasan pelindungan WNI khususnya pelajar yang berada di Yaman Selatan.

KBRI Muscat juga telah mendampingi Direktur Timur Tengah Kemlu RI dalam pertemuan dengan Duta Besar Yaman untuk Oman pada bulan November 2025 untuk silaturahmi dan membahas kerja sama bilateral antara Indonesia dan Yaman.

Hubungan bilateral di bidang pertahanan dan keamanan juga dijalin melalui pertemuan dan pertukaran informasi secara terus-menerus dengan National

Security Bureau (NSB) untuk memantau perkembangan situasi di Yaman. Hal tersebut diperlukan untuk menjadi bahan analisa dalam rangka menjaga keamanan WNI di wilayah Yaman.

Di pihak lain, eskalasi politik dan keamanan meningkat selama 2025, baik di Yaman Utara maupun Yaman Selatan. Houthi mendeklarasikan diri mendukung Palestina dan menyerang kapal-kapal di Laut Merah dan sejumlah wilayah Israel. Hal itu direspons balik Israel dan Amerika Serikat dengan menyerang berulang kali ke wilayah Sana'a, Hudaidah, Amran, dan wilayah Houthi lainnya. Hal tersebut menimbulkan kerawanan pada keselamatan WNI yang berada di Yaman Utara. Sehubungan dengan hal tersebut, pada akhir Oktober 2024, KBRI telah menyampaikan serangkaian himbauan bagi WNI di Yaman Utara. Evakuasi WNI di Yaman Utara juga telah dilaksanakan dalam 2 gelombang pada bulan Mei dan Juli 2025. Oman telah menjadi mediator antara Yaman Utara dan Amerika Serikat hingga persetujuan gencatan senjata tercapai pada bulan Mei 2025.

Eskalasi konflik bersenjata di Yaman Selatan terjadi antara pasukan *Southern Transition Council* (STC) dan Pemerintah Yaman pada akhir bulan Desember 2025. Dalam hal ini, KBRI Muscat telah mengeluarkan himbauan bagi WNI di Yaman Selatan.

EKONOMI

Tahun 2025 menjadi periode konsolidasi sekaligus akselerasi perekonomian Oman menuju struktur ekonomi yang lebih resilien dan berkelanjutan. Reformasi fiskal, pemulihan migas, penguatan sektor non-migas, serta langkah diversifikasi yang semakin terukur menempatkan Oman pada jalur pertumbuhan yang konstruktif ke depan. Meskipun masih terdapat tantangan struktural, komitmen pemerintah terhadap transformasi ekonomi memberikan dasar bagi prospek positif jangka menengah.

Tahun 2025 menandai fase stabilisasi dan pertumbuhan terukur bagi perekonomian Kesultanan Oman setelah beberapa tahun dihadapkan pada tantangan fiskal dan eksternal. Ekonomi secara keseluruhan tumbuh sekitar 2,2 % menurut proyeksi pemerintah, dengan realisasi pertumbuhan GDP tercatat meningkat dibandingkan 2024. Struktur perekonomian menunjukkan kontribusi non-migas sebesar 73,3 % terhadap GDP (Kementerian Ekonomi Oman, Q3 tahun 2025), mencerminkan keberhasilan strategi diversifikasi ekonomi jangka menengah. Sektor jasa, industri, agrikultur, dan perdagangan menjadi pendorong utama. Sektor pariwisata diproyeksikan menyumbang ≈ RO 3,5 miliar pada GDP, membuktikan pemulihan kuat pasca-pandemi. Reformasi fiskal termasuk VAT dan peningkatan pendapatan non-migas yang mencapai sekitar RO 3,57 miliar turut menguatkan basis pendapatan. Tantangan tetap ada berupa ketergantungan pada minyak & gas, pertumbuhan non-migas yang moderat, serta kebutuhan SDM berkualitas dan infrastruktur untuk mendukung momentum. Outlook jangka menengah tetap positif dengan komitmen dukungan keberlanjutan kebijakan

diversifikasi, stabilitas fiskal, dan peningkatan peran sektor swasta dalam perekonomian.

Vision Oman 2040 menjadi kerangka utama pembangunan, dengan fokus pada:

- Diversifikasi ekonomi berbasis industri dan jasa bernilai tambah;
- Penguatan investasi dan posisi Oman sebagai hub komersial dan logistik kawasan;
- Pengembangan energi terbarukan dan ekonomi hijau;
- Peningkatan kualitas SDM dan tata kelola fiskal.

Pada sisi investasi, arus masuk investasi langsung asing (FDI) terus menunjukkan kinerja positif. Hingga akhir kuartal kedua 2025, FDI mencatat pertumbuhan sebesar 12,8%, dengan nilai mencapai sekitar RO 30,279 miliar. Peningkatan ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Oman serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Sementara itu, tingkat inflasi di Oman berada pada level rendah dan stabil sepanjang 2025. Rata-rata inflasi hingga November 2025 tercatat sekitar 0,9%, menandai capaian penting mengingat lingkungan global yang penuh tekanan. Stabilitas harga ini menunjukkan kemampuan ekonomi Oman untuk tumbuh secara berkelanjutan di tengah implementasi Rencana Pembangunan Lima Tahun Kesepuluh (2021–2025) dan agenda “Vision Oman 2040” yang menekankan diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor-sektor non-migas.

Dari segi perdagangan, Kesultanan Oman mencatat surplus sebesar RO 4,690 miliar hingga akhir Oktober 2025. Surplus ini ditopang oleh nilai ekspor barang yang mencapai RO 19,359 miliar, lebih tinggi dibandingkan nilai impor yang tercatat sebesar RO 14,669 miliar pada periode yang sama.

Indonesia secara aktif mendorong diversifikasi hubungan perdagangan dengan Oman untuk meningkatkan nilai perdagangan dua arah serta memperluas kerja sama investasi dan pariwisata. Pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Duta Besar Oman menekankan perlunya peningkatan konektivitas pelaku usaha dan misi dagang bersama.

Konektivitas pelaku usaha dan misi dagang bersama telah dilaksanakan antara lain BUMN Indonesia (Garuda Maintenance Facility Aero Asia) mengikuti tender pengelolaan Maintenance Repair and Overhaul di Oman, Oman dan komunitas bisnisnya meningkatkan engagement langsung dengan pelaku usaha Indonesia, termasuk melalui kegiatan seperti Advantage Oman Business Dialogue yang digelar di Jakarta pada Oktober 2025. Forum ini mengundang lebih dari 30 perusahaan Indonesia untuk mengeksplorasi peluang di sektor strategis seperti pertambangan, manufaktur, keamanan pangan, pariwisata, dan aviasi.

Kegiatan perdagangan dan promosi bilateral juga diperkuat melalui partisipasi Oman dalam Trade Expo Indonesia dan aktivitas Omani Chamber of Commerce

and Industry (OCCI Buraimi Brunch), yang membuka dialog dan jalinan kerjasama di berbagai sektor ekonomi, serta partisipasi Indonesia dalam pameran OHEC tahun 2025.

Upaya-upaya tersebut telah menjadikan Kerja sama perdagangan antara Oman dan Indonesia pada tahun 2025 terus berkembang. Meskipun pada tahun 2025 total perdagangan kedua negara mengalami penurunan dibanding tahun 2024, ekspor Indonesia ke Oman mengalami pertumbuhan yang cukup baik dari 375.30 juta dollar AS di November 2024 menjadi 414.00 juta dollar AS di bulan yang sama tahun 2025 sekaligus memperkecil defisit dari 778.60 juta dollar AS menjadi 327.9 juta dollar AS.

Jumlah kunjungan wisatawan asal Oman ke Indonesia dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Upaya promosi pariwisata Indonesia kepada publik Oman telah dilakukan melalui berbagai kegiatan:

a. Promosi melalui media sosial, dengan membuat konten dan membawa influencer Oman ke Bali.
b. Membawa delegasi Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) ke-11 ke Nusa Dua.
c. Menyelenggarakan business matching pariwisata dengan menghadirkan delegasi Kemenpar dan pihak seller dari Indonesia untuk bertemu dengan pihak buyer di Muscat.
d. Membuat materi promosi (notebook pariwisata)

e. Melayani pertanyaan terkait pariwisata, termasuk visa dan mpda transportasi secara langsung kepada publik Oman, baik dalam kesempatan pameran, perjalanan dinas maupun menerima tamu di KBRI Muscat.

Jumlah Kunjungan Wisatawan Oman Per Bulan 2025 (Oktober)

Tahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
2025	1.155	827	126	890	1.300	2.486	2.831	1.958	1.102	1.289	-	-	13.964

Sumber: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3MCMy/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-per-bulan-menurut-kebangsaan.html

Jumlah kunjungan wisatawan asal Yaman ke Indonesia dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Kendati tidak dilakukan promosi pariwisata Indonesia secara langsung, KBRI Muscat menjaga hubungan dengan mitra travel agen di kota Salalah, Oman yang kerap mempromosikan Indonesia kepada publik

Yaman yang kerap datang ke Salalah, baik karena pekerjaaan atau berdomosili di Salalah.

Jumlah Kunjungan Wisatawan Yaman Per Bulan Tahun 2025 (Oktober)

Tahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
2025	461	305	205	481	722	817	1.030	924	651	718	-	-	6.314

Sumber: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3MCMy/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-per-bulan-menurut-kebangsaan.html

SOSIAL BUDAYA

OMAN

1. Periode 2025 Publikasi di Media Sosial dan media local mengenai Indonesia di media setempat tidak menonjol. Isu pemberitaan masih seputar eskalasi politik yang terjadi di negara-negara GCC dan Timur Tengah.

2. Adapun publikasi via media social KBRI terkait pelaksanaan berbagai fungsi, promosi budaya, pembinaan, kerja sama bilateral (termasuk konsultasi politik) dan berbagai kunjungan (termasuk kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri RI dan pejabat tinggi lainnya serta kunjungan pejabata dan para pengusaha dari Oman dan Yaman terutama saat kegiatan *Trade Expo Indonesia* Tahun 2025.

3. KBRI menjadi penggagas, fasilitator sekaligus partisipasi pada berbagai kegiatan festival/promosi budaya di Oman antara lain di promosi batik, tari, kuliner, olahraga (lomba berbgai cabang olah raga dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-80, Funwalk serta menjadi tuan rumah GCC Games yang diperuntukkan bagi diaspora di kawasan Timur Tengah.

4. Pembinaan WNI selama tahun 2025 dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dan kegiatan dengan masyarakat Indonesia antara lain warung diaspora (wardi), acara keagamaan (pengajian, perayaan natal, Idul Fitr, Iftar, tadaraus, dll).

5. Sementara itu Fungsi Pensosbud juga melaksanakan pertemuan:
   a. Pertemuan dengan pihak sekolah dan kampus di Muscat untuk meningkatkan jejaring antara lain berpartisipasi dalam pameran pendidikan yang diselenggarakan oleh Kemeterian Pendidikan Oman setiap tahun.
   b. Memfasilitasi delegasi mahasiswa Indonesia pada Perlombaan Debat Bahasa Arab di Muscat.
   c. Mendukung kegiatan *International Day* yang diadakan setiap tahun di sekolah-sekolah Internasional di Oman.

d. Mendukung organisasi olah raga di Indonesia dalam kegiatan pertandingan yang dilaksanakan di Oman seperti fasilitasi delegasi Pordasi (olahraga berkuda), delegasi hockey, atlit Ironman Oman.

YAMAN

1. Bidang pendidikan
   a. Memfasilitasi proses seleksi penerima beasiswa bagi mahasiswa di Yaman (beasiswa Baznas)
   b. Mendukung program Kemdikbud dalam beasiswa KNB dan Darmasiswa bagi mahasiswa Oman

2. Petugas Pendukung PPIH Arab Saudi Tahun 2025
   a. Memfasilitasi proses seleksi petugas pentukung PPIH Arab Saudi Tahun 2025 oleh Kementerian Agama RI bagi pelajar Yaman.
   b. Tercatat 14 orang pelajar Indonesia di Yaman lolos seleksi menjadi PPIH Arab Saudi Tahun 2025

3. Pembinaan pelajar di Yaman (sekitar 5000 orang) dilakukan secara berkala baik secara langsung di Tarim dan Mukalla maupun secara *daring*. Terakhir dilakukan pada Desember 2025 lalu.

PELAYANAN KEKONSULERAN DAN PELINDUNGAN WNI

- Perlindungan WNI dan Kekonsuleran di Oman

KBRI Muscat terus berupaya memberikan perlindungan kepada WNI di Oman dan Yaman, serta meningkatkan layanan kekonsuleran. Hingga November 2025, sebanyak 6.101 WNI di Oman menjadi elemen strategis dalam mendukung kepentingan nasional Indonesia. Diaspora Indonesia di Oman juga dapat berkontribusi bagi pembangunan di tanah air. Oleh karena itu, pelayanan kekonsuleran dan perlindungan WNI menjadi prioritas utama yang terus ditingkatkan.

Mayoritas WNI di Oman adalah PMI yang bekerja sebagai PLRT. Masalah utama mereka meliputi hak ketenagakerjaan, kasus kaburan, *overstay*, penggunaan visa kunjungan untuk bekerja, serta pengiriman non-prosedural dan ilegal yang melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

PMI ilegal sering kali bekerja tanpa kontrak, tidak memiliki izin tinggal, dan rentan terhadap pelanggaran hak seperti tidak menerima gaji yang layak, ancaman, dan perlakuan tidak manusiawi. Kondisi mereka diperburuk dengan risiko kesehatan dan keselamatan akibat ketiadaan asuransi. Mereka juga terjebak dalam posisi lemah saat menghadapi kasus hukum, terutama karena denda sebesar OMR 500 (sekitar 20 juta rupiah) untuk meninggalkan Oman.

Pada tahun 2025, Pemerintah Oman telah memberlakukan program amnesti bagi pemegang visa kunjungan yang telah *overstay* dan pemegang visa kerja yang telah dilaporkan kaburan oleh majikan. KBRI Muscat telah membantu PMI dalam proses pendaftaran dan koordinasi dengan Kemenaker Oman dalam pengajuan amnesti oleh PMI.

KBRI Muscat terus berkoordinasi dengan pihak terkait di Oman dan Indonesia untuk menindak agen atau sponsor ilegal dan mencegah pengiriman PMI non-prosedural.

Kategori WNI lain yang rentan mengalami masalah-masalah perlindungan antara lain Anak Buah Kapal (ABK) dan WNI yang transit di Muscat termasuk WNI jamaah umrah yang sebagian besar sakit dan dirawat di salah satu rumah sakit di Muscat.

- Perlindungan WNI di Yaman

Terdapat 4.891 WNI di Yaman, mayoritas pelajar di Provinsi Hadramaut, Yaman Selatan. Sebagian kecil lainnya tinggal di Sana'a dan Aden, bekerja domestik, menempuh pendidikan, atau menikah dengan warga Yaman.

Kasus perlindungan di Yaman meliputi overstay, keimigrasian, pernikahan campur, penipuan, dan kematian WNI. Namun, risiko keamanan tetap tinggi akibat serangan yang terjadi selama tahun 2025, tidak hanya di Yaman Utara, namun juga di Yaman Selatan.

KBRI Muscat telah menetapkan status Siaga I untuk WNI di Yaman utara dan Siaga III di Yaman Selatan. Akibat eskalasi konflik yang terjadi di Yaman Utara, KBRI Muscat telah melakukan evakuasi dalam 2 gelombang yang diikuti oleh 32 WNI pada bulan Mei dan Juli 2025. Terkait eskalasi konflik di Yaman Selatan pada bulan Desember 2025, KBRI Muscat telah menerbitkan serangkaian himbauan bagi WNI di Yaman Selatan. Dalam menyikapi konflik di Yaman, KBRI Muscat telah menetapkan SK Rencana Kontinjensi yang akan diperbaharui menyesuaikan perkembangan konflik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA









BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis

II.1 Visi

Visi KBRI Muscat tahun 2025 - 2029 yang diselaraskan dengan visi Kementerian Luar Negeri RI tahun 2025 - 2029 yaitu sebagai berikut:

”Memantapkan kemitraan strategis Indonesia dengan Oman dan Yaman yang tangguh guna memperkuat hubungan internasional yang kondusif serta berkontribusi pada tata kelola global yang mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.”

II.2 Misi

Selaras dengan misi Kementerian Luar Negeri periode 2025 – 2029, KBRI Muscat menetapkan misi untuk lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Memajukan diplomasi ekonomi Indonesia di negara akreditasi KBRI Muscat untuk meningkatkan dan memperluas kemitraan ekonomi yang berkeadilan, saling menguntungkan, dan membawa manfaat konkret bagi kesejahteraan dan kemandirian bangsa.
2. Meningkatkan pelayanan dan pelindungan terhadap WNI di negara akreditasi KBRI Muscat, termasuk Pekerja Migran Indonesia.
3. Meningkatkan peran strategis diaspora Indonesia di negara akreditasi KBRI Muscat dalam pembangunan nasional.
4. Meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara besar, berdaulat dan berpengaruh di mata masyarakt internasional melalui penguatan postur diplomasi Indonesia.

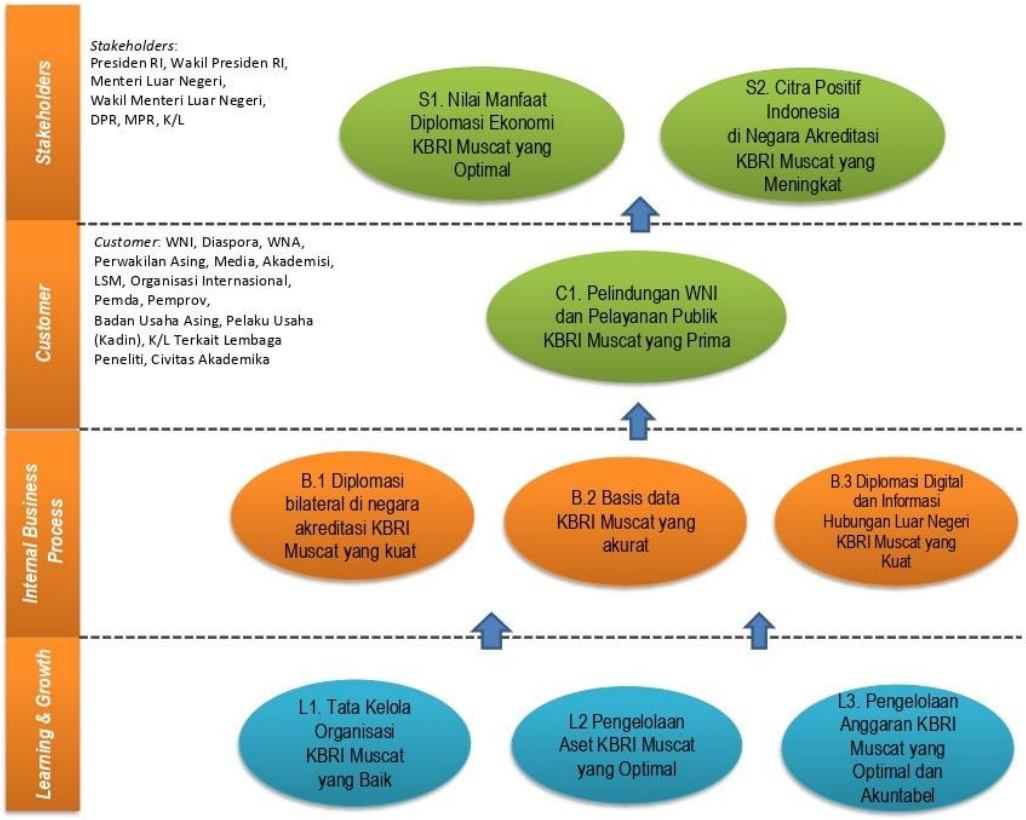
II.3 Tujuan

Merujuk pada tujuan Kementerian Luar Negeri, KBRI Muscat berupaya mewujudkan visi dan misi dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan diplomasi ekonomi Indonesia di negara akreditasi KBRI Muscat untuk memajukan kemitraan ekonomi, meningkatkan daya saing, memperluas peluang, memperkuat posisi tawar Indonesia, dan membawa manfaat konkret bagi kesejahteraan dan kemandirian bangsa.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan terhadap WNI di negara akreditasi KBRI Muscat, termasuk Pekerja Migran Indonesia.
3. Meningkatkan keterlibatan aktif diaspora Indonesia secara strategis dalam pembangunan nasional.

4. Memperkuat postur diplomasi guna meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia melalui tata kelola organisasi yang baik di lingkungan KBRI Muscat.

II.2 Perjanjian Kinerja



Kode	Sasaran	Kode IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Stakeholders Perspective				
S.1	Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KBRI Muscat yang Optimal	IK S.1.1	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Muscat	92.67%

Kode	Sasaran	Kode IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IK S.1.2	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI Muscat	88.00%
		IK S.1.3	Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan wilayah kerja KBRI Muscat	97%
S.2	Citra positif Indonesia di negara akreditasi KBRI Muscat yang meningkat	IK S.2.1	Indeks Citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Muscat	4,10 (skala 5)
Customer Perspective				
C.1	Pelindungan WNI dan pelayanan publik KBRI Muscat yang prima	IK C.1.1	Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Muscat yang diselesaikan	90%

Kode	Sasaran	Kode IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		IK C.1.2	Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI Muscat	4 (Skala 4)
		IK C.1.3	Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI KBRI Muscat	4 (Skala 4)
Internal Business Process Perspective				
B.1	Diplomasi bilateral di negara akreditasi KBRI Muscat yang kuat	IK B.1.1	Jumlah kesepakatan yang dihasilkan dengan negara akreditasi KBRI Muscat	1
		IK B.1.2	Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan	2
B.2	Basis data KBRI Muscat yang akurat	IK B.2.1	Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Muscat yang terverifikasi di Portal Peduli WNI	100%
		IK B.2.2	Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang negara akreditasi KBRI Muscat	90
B.3	Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri KBRI Muscat yang Kuat	IK B.3.1	Persentase Impresi *Engagement* Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat pada KBRI Muscat	70%
Learning and Growth Perspective				
L.1	Tata kelola organisasi KBRI Muscat yang baik	IK L.1.1	Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Muscat	72,25

Kode	Sasaran	Kode IK	Indikator Kinerja (IK)	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
L.2	Pengelolaan aset KBRI Muscat yang optimal	IK L.2.1	Indeks Pengelolaan BMN KBRI Muscat	3,70 (Skala 4)
L.3	Pengelolaan anggaran KBRI Muscat yang optimal dan akuntabel	IK L.3.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KBRI Muscat	93,20

Pada Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 KBRI Muscat menetapkan 9 (sembilan) Sasaran Strategis yang terdiri dari 4 perspektif yaitu *Stakeholders Perspective*, *Customers Perspective*, *Internal Business Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective, yaitu:*

Stakeholders' Perspective tahun 2025 meliputi:

- Sasaran Strategis S1 "Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KBRI Muscat yang Optimal" yang diturunkan ke IKU S1.1 "Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi KBRI Muscat", IKU S1.2 "Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI Muscat", dan IKU S1.3 "Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Negara Akreditasi KBRI Muscat yang masing-masing memiliki 2 Sub IKU.
- Sasaran Strategis S2 "Citra Positif Indonesia di Negara Akreditasi KBRI Muscat yang Meningkat" yang diturunkan ke IKU S2.1 "Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi KBRI Muscat".

Customers' Perspective KBRI Muscat tahun 2024 meliputi:

- Sasaran Strategis C1 "Pelindungan WNI dan Pelayanan Publik KBRI Muscat yang Prima" yang diturunkan ke IKU C1.1 "Persentase Kasus WNI di Negara Akreditasi KBRI Muscat yang Diselesaikan", IKU C1.2 "Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran KBRI Muscat", dan IKU C1.3 "Nilai Persepsi Pelayanan Pelindungan WNI KBRI Muscat".

Internal Business Process Perspective KBRI Muscat tahun 2024 meliputi:

- Sasaran Strategis B1 "Diplomasi Bilateral di Negara Akreditasi KBRI Muscat yang Kuat" yang diturunkan ke IKU B1.1 "Jumlah Kesepakatan Yang Dihasilkan Dengan Negara Akreditasi KBRI Muscat" dan IKU B1.2 "Jumlah Analisis Potensi Ekonomi Tematik Yang Dimanfaatkan Pemangku Kepentingan"

- Sasaran strategis B2 “Basis Data KBRI Muscat yang Akurat” yang diturunkan ke IKU B2.1 “Persentase WNI di Negara Akreditasi KBRI Muscat yang Terverifikasi di Portal Peduli WNI” dan IKU B2.2 “Nilai Laporan Data *Economic Intelligence/Market Intelligence* tentang Negara Akreditasi KBRI Muscat”.
- Sasaran strategis B3 “Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri KBRI Muscat yang Kuat” yang diturunkan ke IKU B3.1 “Persentase Impresi Engagement Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat pada KBRI Muscat”.

Learning & Growth Perspective KBRI Muscat tahun 2025 meliputi:

- Sasaran Strategis L1 “Tata Kelola Organisasi KBRI Muscat yang Baik” yang diturunkan ke IKU L1.1 “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Muscat”.
- Sasaran Strategis L2 “Pengelolaan Aset KBRI Muscat yang Optimal” yang diturunkan ke IKU L2.1 “Indeks Pengelolaaan BMN KBRI Muscat”.
- Sasaran Strategis L3 “Pengelolaan Anggaran KBRI Muscat yang Optimal dan Akuntabel” yang diturunkan ke IKU L3.1 “Nilai IKPA KBRI Muscat”

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA









BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja KBRI Muscat dilakukan dengan cara membandingkan antara target/rencana dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari 4 perspektif yaitu *Stakeholders*, *Customers*, *Internal Business Process*, dan *Learning and Growth*. Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NCKO) KBRI Muscat tahun 2025 yaitu 104,02 dengan predikat Istimewa.

Pada tahun 2025, capaian IKU terkait dengan *Stakeholders' Perspective* mencapai realisasi sebesar 109,50. Sedangkan, IKU *Customers' Perspective* memperoleh persentase realisasi sebesar 103,70. Sementara itu, perolehan persentase *Internal Business Process Perspective* yaitu sebesar 102,63. IKU *Learning* & *Growth Perspective* memperoleh capaian realisasi sebesar 101,00.

Adapun rincian realisasi capaian kinerja IKU KBRI Muscat tahun 2025 sebagaimana disampaikan pada tabel di bawah.

NCKO 2025 (Istimewa)				**104,02**
Stakeholder Perspective (25%)				**109,50**
S1 : Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KBRI Muscat yang Optimal				**110,21**
Nama IK	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**	**Toleransi Capaian**
Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Muscat	92,67	105,56	113,90	N/A
- Jumlah komitmen perdagangan	8	8		
- Jumlah potensi transaksi perdagangan	9	10		
Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI Muscat	88,00	100,00	113,64	N/A

- Jumlah komitmen investasi inbound+outbound	1	1		
- Jumlah potensi transaksi investasi inbound+outbound	1	1		
Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Muscat	97,00	100,00	103,09	N/A
S2 : Citra positif Indonesia di negara akreditasi KBRI Muscat yang meningkat				**108,78**
Nama IK	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**	**Toleransi Capaian**
Indeks Citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Muscat	4,10	4,46	108,78	N/A
Customer Perspective (15 %)				**103,70**
C1 : Pelindungan WNI dan pelayanan publik KBRI Muscat yang prima				**103,70**
Nama IK	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**	**Toleransi Capaian**
Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Muscat yang diselesaikan	90,00	100,00	111,11	N/A
Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI Muscat	4,00	4,00	100,00	N/A
Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI KBRI Muscat	4,00	4,00	100,00	N/A
Internal Business Process Perspective (30 %)				**102,63**

B1 : Diplomasi bilateral di negara akreditasi KBRI Muscat yang kuat				**100,00**
Nama IK	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**	**Toleransi Capaian**
Jumlah kesepakatan yang dihasilkan dengan negara akreditasi KBRI Muscat	1,00	1,00	100,00	N/A
Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan	2,00	2,00	100,00	N/A
B2 : Basis data KBRI Muscat yang akurat				**100,76**
Nama IK	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**	**Toleransi Capaian**
Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Muscat yang terverifikasi di Portal Peduli WNI	100,00	100,00	100,00	N/A
Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang negara akreditasi KBRI Muscat	90,00	92,00	102,22	N/A
B3 : Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri KBRI Muscat yang Kuat				**107,14**
Nama IK	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**	**Toleransi Capaian**
Persentase Impresi Engagement Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat pada KBRI Muscat	70,00	75,00	107,14	N/A
Learning & Growth Perspective (30 %)				**101,00**
L1 : Tata kelola organisasi KBRI Muscat yang baik				**102,70**

Nama IK	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Muscat	72,25	74,20	102,70	N/A
L2 : Pengelolaan aset KBRI Muscat yang optimal				**98,65**
Nama IK	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**	**Toleransi Capaian**
Indeks Pengelolaan BMN KBRI Muscat	3,70	3,65	93,51	N/A
L3 : Pengelolaan anggaran KBRI Muscat yang optimal dan akuntabel				**104,99**
Nama IK	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**	**Toleransi Capaian**
Nilai IKPA KBRI Muscat	93,20	97,85	106,78	N/A

Stakeholder Perspective

S1 Nilai manfaat diplomasi ekonomi KBRI Muscat yang optimal

Sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI serta amanat kinerja dari Presiden RI, Kinerja diplomasi ekonomi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang perdagangan, investasi, dan wisatawan mancanegara. Hal ini ditujukan agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air.

Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal merupakan jumlah nominal manfaat secara ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang paling menguntungkan yang dihasilkan oleh berbagai kerja sama dan hubungan perdagangan, investasi, dan pariwisata antara negara.

Diplomasi Ekonomi adalah pelaksanaan kebijakan diplomasi dalam bidang hubungan luar negeri secara bilateral, regional dan multilateral untuk memajukan kesejahteraan umum dan melindungi serta memperjuangkan kepentingan

ekonomi nasional dalam sektor perdagangan, investasi, pariwisata, ketenagakerjaan, finansial, dan kerja sama pembangunan internasional.

Optimal berarti paling baik dan tertinggi.

Sasaran Strategis (SS) S1 diukur berdasarkan capaian pada 3 (tiga) IK dan perhitungan capaian pada tiap IK merujuk pada realisasi Komponen masing-masing, dengan rincian sebagai berikut:

1. IK S1.1: Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Muscat, yang capaiannya merupakan agregat capaian Komponen:
   a. Jumlah komitmen perdagangan
   b. Jumlah potensi transaksi perdagangan

2. IK S1.2: Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI Muscat, yang capaiannya merupakan agregat capaian Komponen:
   a. Jumlah komitmen investasi inbound dan outbound
   b. Jumlah potensi transaksi investasi inbound dan outbound

3. IK S1.3: Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Muscat yang capaiannya merupakan agregat capaian Komponen:
   a. Potensi kunjungan wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI Muscat ke Indonesia

Analisis IK S1.1

Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi KBRI Muscat

Deskripsi IK

Efektivitas diplomasi ekonomi berarti IK ini sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Kemenlu dan Perwakilan RI serta melaksanakan amanat Presiden RI dalam RPJMN 2025 - 2029, yakni kinerja diplomasi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang perdagangan agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air. Indikator Kinerja ini secara spesifik mengukur value yang diperoleh Indonesia dari upaya diplomasi ekonomi untuk perdagangan.

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan

pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Ruang lingkup:

IK1 memiliki 2 komponen, yakni:

Komponen 1: Jumlah komitmen perdagangan, dengan bobot 50%

Komponen ini mengukur jumlah komitmen perdagangan yang diperoleh dari kegiatan diplomasi ekonomi yang menyangkut perdagangan, seperti business matching, pembukaan pasar potensial dan unggulan, promosi dagang dan forum kerja sama. Jumlah komitmen perdagangan dihitung untuk suatu negara akreditasi.

Komitmen merupakan bentuk kesepakatan yang tertulis antara Indonesia dengan entitas di negara akreditasi, yang didalamnya memuat nilai perdagangan yang disepakati.

Komponen 2: Jumlah potensi transaksi perdagangan, dengan bobot 50%

Komponen ini mengukur jumlah potensi transaksi perdagangan yang diperoleh dari kegiatan diplomasi ekonomi yang menyangkut perdagangan, seperti business matching, pembukaan pasar potensial dan unggulan, promosi dagang dan forum kerja sama. Jumlah potensi transaksi perdagangan dihitung untuk suatu negara akreditasi.

Data yang digunakan sebagai baseline target mengacu kepada data historis.

Jika di negara akreditasi/wilayah kerja Perwakilan RI hanya terdapat satu komponen, maka diterapkan normalisasi untuk menghitung capaian indeks efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan batas toleransi sebesar 80%.

Batasan waktu:

Tingkat efektivitas yang dihitung adalah tingkat efektivitas yang diperoleh dari penghitungan masing-masing komponen sesuai dengan periode masing-masing komponen pada tahun berjalan.

Informasi Kinerja

Tabel III.1

Capaian IK S1.1 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi KBRI Muscat

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai Capaian SUB IK*)	Nilai Bobot **)
Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi KBRI Muscat	Capaian Komponen 1 : Jumlah komitmen perdagangan (50%)	**8**	**50%**
	Capaian Komponen 2 : Jumlah potensi transaksi perdagangan (50%)	**10**	**50%**
Realisasi			**105,56**
Target			**92,67**
Capaian			**113,90%**
Batas Toleransi*)** (jika capaian melebihi 120%)			**N/A**

Pada tahun 2025, realisasi IK S1.1 “Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi KBRI Muscat” tercatat sebesar 105,56, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 92,67. Dengan demikian, capaian IK mencapai 113,90.

Realisasi IK S1.1 diperoleh melalui penjumlahan bobot capaian Komponen 1 dan Komponen 2. Pada tahun 2025, realisasi Komponen 1 “Jumlah komitmen perdagangan” mencapai 8 dari target sebesar 8, sehingga capaian IK mencapai 113,90.

Perolehan komitmen perdagangan pada tahun 2025 didominasi oleh sektor kesehatan.

Realisasi Komponen 2 “Jumlah potensi transaksi perdagangan” pada 2025 tercatat sebesar 10 dari target sebesar 9, sehingga capaian IK mencapai 113,90.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.2

Target, Realisasi, dan Capaian IK Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi KBRI Muscat

Kode IK/ SUB IK		2023	2024	2025
S1.1	Target	92,00	92,00	92,67
	Realisasi	94,08	96,57	105,56
	Capaian	98,34	104,97	113,90
Komponen 1	Target	N/A	N/A	8
	Realisasi	N/A	N/A	8
	Capaian	N/A	N/A	113,90
Komponen 2	Target	N/A	N/A	9
	Realisasi	N/A	N/A	10
	Capaian	N/A	N/A	113,90

IK S1.1 “Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi KBRI Muscat diadopsi pada tahun 2022 setelah dilakukan penajaman formulasi dan perubahan nomenklatur untuk mengukur capaian diplomasi ekonomi secara lebih optimal. Capaian IK di tahun 2025 dibandingkan dengan capaian IK tahun 2024 dan 2023.

Target IK tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi 92,67 dari yang sebelumnya 92,00 pada tahun 2024. Target tahun 2025 ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan realisasi dan capaian IK Tahun 2024 yang melampaui target, serta

untuk memacu performa kinerja diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan penetapan target yang menantang namun tetap achievable.

Target Komponen 1 pada tahun 2025 yaitu 11 komitmen. Realisasi Komponen 1 yaitu 8 komtimen. Komponen 2 baru diadopsi pada tahun 2024 setelah dilakukan penajaman formulasi dan perubahan nomenklatur untuk mengukur capaian diplomasi ekonomi secara lebih optimal. Dengan demikian, target dan realisasi Komponen 2 di tahun 2025 hanya dapat dibandingkan dengan capaian IK tahun 2024.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IK

Keberhasilan KBRI Muscat dalam Pencapaian IK Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan Negara Akreditasi antara lain didukung oleh keberhasilan upaya promosi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025.

Salah satu sasaran dari kegiatan promosi tersebut adalah untuk lebih memperkenalkan Indonesia di kalangan pengusaha setempat sebagai negara produsen yang berkualitas dengan harga yang kompetitif.

Strategi lain yang juga mendukung adalah dengan meningkatkan intensitas interaksi antar pengusaha Indonesia dan negara akreditasi dengan mendorong dan memfasilitasi komunikasi dan pertemuan antara asosiasi pengusaha kedua negara yaitu antara lain OCCI cabang Al Buraimi dan KADIN Indonesia, business macthing atara dan one-on-one business meeting antar pengusaha kedua negara.

Upaya lain adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk memfasilitasi interaksi antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha di negara akreditasi misalnya dengan mengintensifkan penyelenggaraan pertemuan bisnis secara daring. KBRI Muscat juga telah memberikan peningkatan fasilitasi bagi kalangan pengusaha yang ingin melakukan ekspansi ke negara akreditasi baik ekspor maupun investasi antara lain fasilitasi penyelenggaraan pameran yang berlangsung di negara akreditasi.

Pada tahun 2025 KBRI memfasilitasi partisipasi pengusaha alat kesehatan Indonesia dalam pameran *Oman Health Conference and Exhibition* yang diselenggarakan pada bulan September di Muscat berupa penyediaan booth pameran, penyediaan transportasi, business matching dengan mitra potensial setempat. Pameran diikuti oleh 6 perusahaan Indonesia produsen alat kesehatan.

Analisis Program yang Mendukung Capaian

Sejumlah program strategis telah dilaksanakan oleh KBRI Muscat sepanjang tahun 2025 untuk mendukung pelaksanaan diplomasi ekonomi khususnya dalam menjaring komitmen perdagangan. Dalam rangka merealisasikan IK tingkat

efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan, berikut beberapa program strategis yang telah dilaksanakan oleh KBRI Muscat pada tahun 2025:

1. Kegiatan Business Matching antara PT Ladang Lima dengan para pelaku usaha di Muscat, 23 Januari 2025 di sektor makanan ringan dan makanan.
2. One-on-One Business Matching antara pimpinan PT Garuda Indonesia dan Garuda Maintenance Facility AeroAsia (GMF) Aeroasia Tbk dengan Civil Aviation Authority (CAA) Oman, Oman Air, Salam Air, Oman Airports, dan Ministry of Transport, Communications, and Information Technology (MTCIT) Oman di Muscat, 6 Februari 2025 sektor perawatan, perbaikan, dan perombakan pesawat terbang.
3. One-on-One Business Matching antara PT. Sinergi Mitra Lestari Indonesia (Mind ID) dengan Oman Abrasives, dan Environment Authority (EA) Oman di Muscat, 23 Februari 2025 sektor penanganan limbah.
4. Menghadiri kegiatan forum promosi investasi *Advantage Oman Forum* (AOF), di Hotel St. Regis di Al Mouj Muscat, 27 – 28 April 2025 yang menyoroti peluang investasi masa depan di seluruh dunia dan lingkungan investasi yang mendorong kerja sama ekonomi di sektor-sektor yang sedang berkembang dan bermitra media dengan jaringan kantor berita CNN.
5. Menfasilitasi kunjungan delegasi Sohar Port Oman dan Badan Lingkungan Hidup Oman ke Indonesia, 5-26 Mei 2025 dalam rangka study proyek perluasan wilayah utara Pelabuhan Industri Sohar mengingat Indonesia memiliki Kawasan hutan mangrove terluas di dunia dan mengambil manfaat dari keahlian Indonesia dalam mengelola dan memulihkan lingkungan pesisir.
6. Melakukan Business Meeting dengan para pelaku usaha asal Yaman di Salalah, 23 Agustus 2025 dalam rangka Promosi Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 & Investasi di Indonesia, dan dengan para pengusaha asal Oman di Salalah, 24 Agustus 2025 dalam rangka Promosi Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 & Investasi di Indonesia. Dalam Business meeting ini, diperoleh komitmen sekitar 40 pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Ekspatriat Yaman akan hadir pada TEI 2025 dan brosur TEI 2025 akan disebar luaskan kepada seluruh anggota Asosiasi di seluruh dunia yang memiliki anggota sekitar 15.000 orang pengusaha. Sementara dari KADIN Provinsi Dhofar Oman berkomitmen akan hadir sekitar 10 pengusaha dari Salalah dan akan menyebarkan brosur TEI 2025 melalui website KADIN dan group WA seluruh anggota KADIN.
7. Melakukan Business Meeting dengan para pengurus dan pengusaha Kamar Dagang dan Industri Provinsi Aden, 30 Agustus 2025 dalam rangka Promosi Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 & Investasi di Indonesia. Dalam Business meeting ini, diperoleh komitmen sekitar 10 pengusaha dari Aden akan hadir TEI 2025 dan menyebarkan brosur TEI 2025 melalui website KADIN Aden dan group WA seluruh anggota KADIN.

8. Melakukan Business Meeting dengan para pengurus dan pengusaha Kamar Dagang dan Industri Wadi Hadhramaut di Seiyun, 2 September 2025 dalam rangka Promosi Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 & Investasi di Indonesia. Dalam Business meeting ini, diperoleh komitmen sekitar 15 pengusaha dari KADIN Wadi Hadhramaut akan hadir TEI 2025 dan menyebarkan brosur TEI 2025 melalui website KADIN Wadi Hadhramaut dan group WA seluruh anggota KADIN.
9. Melakukan Business Meeting dengan para pengurus dan pengusaha Kamar Dagang dan Industri Provinsi Hadhramaut di Mukalla, 7 September 2025 dalam rangka Promosi Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 & Investasi di Indonesia. Dalam Business meeting ini, diperoleh komitmen sekitar 5 pengusaha dari KADIN Hadhramaut di Mukalla akan hadir TEI 2025 dan menyebarkan brosur TEI 2025 melalui website KADIN Hadhramaut dan group WA seluruh anggota KADIN.
10. Fasilitasi dalam pameran di Oman

    Pada tahun 2025 KBRI memfasilitasi partisipasi pengusaha alat kesehatan Indonesia dalam pameran *Oman Health Conference and Exhibition* yang diselenggarakan pada bulan September di Muscat berupa penyediaan booth pameran, penyediaan transportasi, business matching dengan mitra potensial setempat. Pameran diikuti oleh 6 perusahaan Indonesia produsen alat kesehatan, yaitu:
    - PT. Sugih Instrumendo Abadi,
    - PT. Haloni Jane,
    - PT Miconos,
    - PT Atara Cipta Medika,
    - PT Global Medipro Investama, dan
    - PT Likuid Pharmalab Indonesia.

    Partisipasi pada OHEC 2025 telah menghasilkan beberapa kesepakatan awal antara Perusahaan Indonesia dengan mitra potensial di Oman dengan nilai komitmen sekitar Rp 13,5 miliar dalam satu tahun, yaitu:
    a. PT Atara Cipta Medika menjalin kerja sama dengan ICD Group asal Iran untuk penjualan obat eggsell penumbuh tulang senilai Rp 120 juta per tahun.
    b. PT Liquid Pharmalab Indonesia menandatangani dua kontrak:
        - Dengan Niemath Al Noor for Medical Supplies (Muscat) senilai Rp 900 juta (2 kontainer untuk permulaan)
        - Dengan Abna Mahmoud Investment Company (Salalah) senilai Rp 300 juta per bulan.
    c. PT Haloni jane dengan Meera Medical Store (Muscat) mencatat komitmen senilai Rp 334-501 juta per tahun.
    d. PT Miconos bekerja sama dengan Life House LLC (Muscat) untuk ekspor 20 unit mikroskop senilai Rp 346 juta.
    e. PT Global Medipro Investama menandatangani kontrak ekspor 30 kontainer peralatan medis ke Jeraha Instrument Company (Riyadh, Arab Saudi) dengan nilai Rp 10 miliar per tahun.
    f. PT Sugih Instrumendo Abadi menjalin kontrak dengan Meera Medical Store (Muscat) dengan komitmen sebesar Rp 334-501 juta per tahun.

11. Fasilitasi dan mendampingi kunjungan delegasi para pengusaha dari Oman, para pengurus KADIN Aden dan Wadi Hadhramaut serta para pengusaha dari Yaman ke Indonesia dalam rangka menghadiri Trade Expo Indonesia (TEI) di ICE BSD City Tangerang, 15 - 19 Oktober 2025. Fasilitasi kunjungan ini telah menghasilkan kesepahaman:
    - INTAJ LLC dari Muscat Oman telah melakukan transaksi dengan PT Billiton Spice berupa pengiriman 1 kontainer 20 feet produk rempah lada hitam dan lada putih serta pengiriman 1 kontainer 20 feet produk buah nanas ke Oman dengan nilai perdagangan sekitar USD 130,000.
    - Arif Awadh Al Zubaidi Group dari Seiyun Hadhramaut Yaman telah melakukan transaksi dengan PT. Pusan Manis Mulia dari Tangerang Banten Indonesia berupa pengiriman prioduk makanan ringan/snack coklat ke Yaman dengan nilai perdagangan sekitar USD 40,000.
    - Penandatanganan MoU kerjasama antara FYCCI Yaman dengan KADIN Indonesia di Gedung Menara KADIN Jakarta, 17 Oktober 2025 mencakup kerjasama saling tukar informasi pasar, pengiriman misi dagang, konsultasi hambatan perdagangan, dan fasilitasi izin usaha di kedua negara.

12. Fasilitasi dan mendampingi kunjungan delegasi para pengurus KADIN Wadi Hadhramaut dan para pengusaha dari Yaman ke Jawa Timur dalam rangka menghadiri East Java Investment Forum (EJIF) di Four Points Sheraton Pakuwon Hotel Surabaya, 21 - 22 Oktober 2025. Fasilitasi kunjungan ini menghasilkan penandatanganan MoU kerjasama antara Chamber of Commerce and Industry of Wadi Hadhramaut & the Desert (CCI-WHD) Provinsi Hadhramaut Yaman dengan KADIN Surabaya dan HIPMI Surabaya Jawa Timur Indonesia, di Kantor KADIN Jawa Timur. Dalam kerjasama MoU ini mencakup diantaranya adalah saling tukar informasi pasar, pengiriman misi dagang, konsultasi hambatan perdagangan, dan fasilitasi izin usaha di kedua negara.

13. Fasilitasi dan pendampingan kunjungan para pengusaha Oman yang tergabung dalam Oman Chamber of Commerce and Industry (OCCI) Al Buraimi Branch dalam rangka menghadiri pameran Manufacturing Indonesia Series 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, pada tanggal 3–6 Desember 2025. Kunjungan ini telah menghasilkan penandatanganan 9 nota kesepahaman (MoU) dagang, diantaranya:
    - MoU antara PT. Maruno & Anugrah Indonesia dengan Khalifa Bin Badi Al Suwaidi Foundation, Oman (penempatan tenaga kerja);
    - MoU antara IM Holiday Indonesia dengan Dar Al Khaleej for Trading and Contracting Oman (tourisme);
    - MoU antara PT Green Agri Indonesia dengan Northern Oasis LLC Oman (pupuk organik);

- MoU antara PT Sahara Indonesia dengan Tariq Al-Alawi Global Projects Oman (obat herbal);
- MoU antara PT Billiton Rempah Indonesia dengan Skyline for Business and Trading LLC Oman (white/black pepper);
- MoU antara PT Cakra Alam Persada & PT Mutiara Indo Sejati dengan Talal Company for Investment LLC Oman (building materials, solid flooring & decking kayu);
- MoU antara PT Brilyan Trimitra Utama Indonesis dengan Oasis Academy Oman (information technology);
- MoU antara PT Dami Sariwana Indonesia dengan Tariq Al-Alawi Global Projects LLC Oman (obat herbal kapsul);
- MoU antara PT Borden Eagle Indonesia dengan Tariq Al-Alawi Global Projects LLC Oman (obat herbal cair & balsam).

Kendala dan Tantangan

Kendala dan tantangan yang masih dihadapi antara lain:

1. Masih banyak produk Indonesia di negara setempat yang masuk melalui negara ketiga dalam hal ini terutama PEA (Dubai).
2. Sejumlah peluang ekspor Indonesia ke negara akreditasi tidak dapat terealisasi dikarenakan harga tidak kompetitif dengan produk saingan dari negara lain yang sudah ada di pasar setempat.

Upaya Perbaikan

Dalam mengatasi kendala, KBRI Muscat telah melakukan upaya-upaya perbaikan sehingga IK dapat tetap tercapai, upaya tersebut antara lain:

1. KBRI Muscat secara berkelanjutan mendorong pengusaha Indonesia mulai menaruh perhatian yang serius kepada pasar Oman mengingat letak geografis Oman yang strategis dan kemudahan/keunggulan yang dimiliki Oman dalam berdagang dengan negara ketiga.

Dokumentasi

Gambar III.1



Partisipasi Indonesia pada Pameran OHEX- 1

Gambar III.2



Business Matching di sela-sela kegiatan TEI Oktober 2025

Gambar III.3



Kunjungan KADIN Buraimi ke Indonesia

Analisis IK S1.2

Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI Muscat

Deskripsi IK

Efektivitas diplomasi ekonomi berarti bahwa IK ini sesuai dengan tujuan keberadaan organisasi Kemenlu dan Perwakilan RI serta melaksanakan amanat Presiden RI dalam RPJMN 2020-2024, yakni kinerja diplomasi perlu diukur relevansinya dengan capaian di bidang investasi agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air. Sub IK ini secara spesifik mengukur value yang diperoleh Indonesia dari upaya diplomasi ekonomi untuk investasi.

Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal oleh penanam modal dari negara akreditasi untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Ruang lingkup:

IK2 memiliki 2 komponen, yakni:

Komponen 1: Jumlah komitmen investasi inbound + outbound, dengan bobot 50%

Komponen ini mengukur jumlah komitmen investasi yang diperoleh dari kegiatan diplomasi ekonomi yang menyangkut investasi, seperti business matching, pembukaan pasar potensial dan unggulan, promosi investasi dan forum kerja sama. Jumlah komitmen investasi dihitung untuk suatu negara akreditasi.

Komitmen merupakan bentuk kesepakatan yang tertulis antara Indonesia dengan entitas di negara akreditasi, yang didalamnya memuat nilai investasi yang disepakati.

Komponen 2: Jumlah potensi transaksi investasi inbound + outbound, dengan bobot 50%

Komponen ini mengukur jumlah potensi transaksi perdagangan yang diperoleh dari kegiatan diplomasi ekonomi yang menyangkut investasi, seperti business matching, pembukaan pasar potensial dan unggulan, promosi dagang dan forum kerja sama. Jumlah potensi transaksi perdagangan dihitung untuk suatu negara akreditasi.

Data yang digunakan sebagai baseline target mengacu kepada data historis.

Jika di negara akreditasi/wilayah kerja Perwakilan RI hanya terdapat satu komponen, maka diterapkan normalisasi untuk menghitung capaian indeks efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan batas toleransi sebesar 80%.

Batasan waktu:

Tingkat efektivitas yang dihitung adalah tingkat efektivitas yang diperoleh dari penghitungan masing-masing komponen sesuai dengan periode masing-masing komponen pada tahun berjalan.

Informasi Kinerja

Tabel III.3

Capaian IK S1.2 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI Muscat

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai Capaian SUB IK*)	Nilai Bobot **)
Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI Muscat	Capaian Komponen 1 : Jumlah komitmen investasi inbound + outbound (50%)	**1**	**50%**
	Capaian Komponen 2 : Jumlah potensi transaksi investasi inbound + outbound (50%)	**1**	**50%**
Realisasi			**100,00**
Target			**88,00**
Capaian			**113,64%**
Batas Toleransi*)** (jika capaian melebihi 120%)			**N/A**

Pada tahun 2025, realisasi IK S1.2 “Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI Muscat” tercatat sebesar 100,00, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 88,00. Dengan demikian, capaian IK mencapai 113,64.

Realisasi IK S1.2 diperoleh melalui penjumlahan bobot capaian Komponen 1 dan Komponen 2. Pada tahun 2025, realisasi Komponen 1 “Jumlah komitmen investasi” mencapai 1 dari target sebesar 1, sehingga capaian IK mencapai 113,64.

Realisasi Komponen 2 “Jumlah potensi transaksi investasi” pada 2025 tercatat sebesar 1 dari target sebesar 1, sehingga capaian IK mencapai 113,64.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.4

Target, Realisasi, dan Capaian IK Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI Muscat

Kode IK/ SUB IK		2023	2024	2025
S1.2	Target	85,00	85,00	88,00
	Realisasi	518,36	100,00	100,00
	Capaian	120,00	117,65	113,64
Komponen 1	Target	N/A	N/A	1
	Realisasi	N/A	N/A	1
	Capaian	N/A	N/A	100,00
Komponen 2	Target	N/A	N/A	1
	Realisasi	N/A	N/A	1
	Capaian	N/A	N/A	111,11

IK S1.2 “Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi i sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI Muscat” diadopsi pada tahun 2022 setelah dilakukan penajaman formulasi dan perubahan nomenklatur untuk mengukur capaian diplomasi ekonomi secara lebih optimal. Capaian IK di tahun 2025 dibandingkan dengan capaian IK tahun 2024 dan 2023.

Target IK tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi 88,00 dari yang sebelumnya 85,00 pada tahun 2024. Target tahun 2025 ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan realisasi dan capaian IK Tahun 2024 yang melampaui target, serta untuk memacu performa kinerja diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan penetapan target yang menantang namun tetap achievable.

Target Komponen 1 pada tahun 2025 yaitu 1 komitmen. Realisasi Komponen 1 yaitu 1 komtimen. Komponen 2 baru diadopsi pada tahun 2024 setelah dilakukan penajaman formulasi dan perubahan nomenklatur untuk mengukur capaian diplomasi ekonomi secara lebih optimal. Dengan demikian, target dan realisasi Komponen 2 di tahun 2025 hanya dapat dibandingkan dengan capaian IK tahun 2024.

Capaian tahun 2025 antara lain meliputi:

1. Pada 29 Agustus 2025, Mr. Abdullah Hamed Salim Saif Al-Yahmadi dari Muscat Oman telah mendirikan perusahaan di Indonesia dengan nama PT. Urban Farm Africa yang bergerak di bidang pertanian, tehnologi pertanian, makanan, ekspor dan impor, berkedudukan di Bogor Jawa Barat dengan nilai investasi sebesar RP 31 miliar.
2. Pada Agustus 2025, Sheikh Said Al Adawi dari Muscat Oman telah mendirikan perusahaan di Indonesia dengan nama PT. Intaj Energy Indonesia yang bergerak di bidang energi, pertambangan, minyak dan gas, pertanian, makanan, ekspor dan impor, berkedudukan di Cilandak, Pasar Minggu Jakarta Selatan DKI Jakarta dengan nilai investasi sebesar RP 10 miliar

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IK

Capaian KBRI Muscat di sektor investasi antara lain didukung oleh:

Terjadinya Perbaikan Iklim Investasi dan Regulasi di Oman, seperti: penyederhanaan proses perizinan usaha, penguatan perlindungan investor, harmonisasi aturan perdagangan dan investasi, transparansi pajak & kepabeanan. Reformasi ini meningkatkan daya tarik Oman sebagai hub investasi bagi Timur Tengah.

Analisis Program yang mendukung Capaian

Promosi investasi yang dilakukan secara berterusan oleh KBRI Muscat

Kendala dan Tantangan

Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam melakukan investasi di Oman antara lain:

1. Ketidakpastian geopolitik regional yang menyembabkan calon investor menghitung faktor resiko khususnya terkait rantai pasok eksternal.

2. Kebijakan Omanisasi (meprioritaskan tenaga kerja warga negara Oman) disektor manufaktur. Investor sering menghadapi tantangan terkait ketersediaan tenaga kerja skill tertentu, tingkat gaji minimum untuk warga lokal yang mengakibatkan biaya operasional meningkat.

Upaya Perbaikan

1. Memberikan support kepada calon investor Oman ataupun investor Indonesia.
2. Melakukan update iklim dan regualasi investasi di Indonesia kepada investor Oman yang potensial maupun iklim dan regualasi investasi di Oman kepada investor Indonesia.

Dokumentasi

Gambar III.4



Delegasi MOCIIP bertemu BKPM

Gambar III.5



Indonesia Investment Update

Analisis IK S1.3

Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Negara Akreditasi KBRI Muscat

Deskripsi IK

Potensi kunjungan wisatawan mancanegara merupakan pengukuran seberapa tinggi minat wisatawan mancanegara potensial yang merupakan WNA yang memiliki ekspektasi untuk melakukan kunjungan wisata ke Indonesia setelah melihat/menghadiri/berpartisipasi pada promosi pariwisata dan budaya yang diselenggarakan oleh Perwakilan RI atau event promosi yang diselenggarakan pihak lain di mana Perwakilan RI turut sebagai peserta event.

Ruang lingkup:

IK ini mengukur wisatawan potensial dari negara akreditasi yang memiliki ekspektasi tinggi untuk melakukan kunjungan wisata ke Indonesia. Level ekspektasi diukur melalui survei yang mengindikasikan responden sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju bahwa promosi Indonesia telah berhasil meningkatkan minat untuk berkunjung ke Indonesia. Tingkat potensi kunjungan wisatawan dihitung berdasarkan jumlah responden yang menyatakan "setuju" dan "sangat setuju" bahwa promosi Indonesia telah berhasil meningkatkan minat untuk berkunjung ke Indonesia.

Target dan realisasi Perwakilan RI berkontribusi pada target dan realisasi Pusat.

Bagi Perwakilan yang menaungi negara rangkapan, IK menggunakan data agregat dari negara utama dan negara rangkapan.

Batasan waktu:

Data diperoleh berdasarkan penghitungan pada satu tahun anggaran (Januari-Desember).

Informasi Kinerja

Tabel III.5

Capaian IK S1.3 Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Negara Akreditasi KBRI Muscat

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai Capaian SUB IK*)	Nilai Bobot **)
Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan Negara Akreditasi KBRI Muscat	Jumlah responden yang menyatakan ingin berkunjung ke Indonesia pada data survei indeks citra Indonesia di dunia internasional	**23**	**X100%**
	Jumlah responden yang mengisi survei pada data survei indeks citra Indonesia di dunia internasional	**23**	
Realisasi			**100,00**
Target			**97,00**
Capaian			**103,09%**
Batas Toleransi*)** (jika capaian melebihi 120%)			**N/A**

Pada tahun 2025, realisasi IK S1.3 “Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Negara Akreditasi KBRI Muscat” tercatat sebesar 100,00, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 97,00. Dengan demikian, capaian IK mencapai 103,09.

Realisasi IK S1.3 diperoleh dari jumlah responden yang menyatakan ingin berkunjung ke Indonesia pada data survei indeks citra Indonesia di dunia internasional dibandingkan dengan jumlah responden yang mengisi survei.

Pada tahun 2025, terdapat 23 responden dari total 23 responden yang menyampaikan ketertarikan untuk berkunjung ke Indonesia pada survei indeks citra Indonesia di dunia internasional sehingga capaian IK ini yaitu 103,09.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.6

Target, Realisasi, dan Capaian IK Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan Negara Akreditasi KBRI Muscat

Kode IK/ SUB IK		2023	2024	2025
S1.3	Target	93,00	93,00	97,00
	Realisasi	169,64	90,00	100,00
	Capaian	96,77	96,77	103,09

Target IK tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi 97,00 dari yang sebelumnya 93,00 pada tahun 2024. Target tahun 2025 ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan realisasi dan capaian IK Tahun 2024 yang belum melampaui target untuk memacu performa kinerja diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan penetapan target yang menantang namun tetap achievable.

Realisasi IK ini juga mengalami kenaikan pada tahun 2025 menjadi 100,00 dari sebelumnya 90,00 pada tahun 2025. Formulasi tahun 2025 berbeda dengan tahun 2024 karena tidak ada perhitungan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari negara akreditasi KBRI Muscat ke Indonesia.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Capaian KBRI Muscat di sektor pariwisata membuktikan bahwa diplomasi ekonomi di sektor pariwisata berjalan dengan efektif dan berkontribusi dalam memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, yakni dengan dilaksanakannya berbagai program promosi pariwisata Indonesia ke negara akreditasi KBRI Muscat.

Analisis Program yang mendukung Capaian

Sejumlah program strategis telah dilaksanakan oleh KBRI Muscat sepanjang tahun 2025 untuk mendukung pelaksanaan promosi pariwisata indonesia. Guna

merealisasikan IK S.1.3 diplomasi sektor pariwisata, program strategis yang telah dilaksanakan oleh KBRI Muscat pada tahun 2025:

1. Meningkatkan intensitas promosi pariwisata
2. Memperbesar networking (*travel agent*, perusahaan penerbangan)
3. Kolaborasi dengan Kemenpar
4. Kolaborasi dengan *seller* (pihak *hospitality* di Indonesia)

Kendala dan Tantangan

Walaupun KBRI Muscat berhasil mencapai target IK S.1.3 pada tahun 2025, namun terdapat tantangan yang apabila tidak disikapi dengan cermat dapat menurunkan jumlah kunjungan wisatawan Oman ke Indonesia di masa mendatang.

Upaya Perbaikan

KBRI Muscat telah melakukan upaya antisipasi untuk memperkecil potensi menurunkan jumlah kunjungan wisatawan Oman ke Indonesia antara lain:

a. Memperbanyak kegiatan promosi pariwisata
b. Meningkatkan hubungan dengan mitra travel agent

Proyeksi Kedepan

Guna memitigasi potensi penurunan kinerja promosi pariwisata, KBRI Muscat perlu memperhatikan dan melakukan inovasi promosi dan memperluas target pasar pariwisata (*outbound travel agent*) di Oman.

Dokumentasi



Gambar III.6

Poster Kegiatan Tourism Business Matching Indonesia – Oman di Muscat, 19 Oktober 2025



Gambar III.7

Tourism Business Matching Indonesia – Oman di Muscat dengan Kemenpar Indonesia, 19 Oktober 2025



Gambar III.8

Promosi Pariwisata Indonesia dalam Oman Health Exhibition and Conference, 22 – 24 September 2025

S2 Citra Positif Indonesia di Negara Akreditasi KBRI Muscat yang Meningkat

Citra positif Indonesia adalah persepsi yang dipercayai/diyakini aktor lain terhadap Indonesia yang didasarkan kepada pola perilaku yang ditunjukkan Indonesia dalam pergaulan internasional. Pola perilaku tersebut terbangun berdasarkan power yang dimiliki, baik yang bersifat hard maupun soft. Citra dalam hal ini dapat bersifat positif maupun negatif. Citra juga merupakan salah satu dampak akhir yang terbentuk dari suatu usaha diplomasi ataupun kebijakan luar negeri yang diambil. Citra positif adalah hal yang perlu dibangun oleh Indonesia di mata dunia internasional. Adanya citra positif yang terbentuk akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional, sehingga dapat menempatkan posisi Indonesia sebagai negara yang berdaulat dalam berbagai aspek kehidupan.

Negara akreditasi/wilayah kerja adalah tempat kedudukan Perwakilan RI beserta negara/wilayah kerja rangkapan yang dimandatkan secara resmi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah RI.

Latar belakang:

Citra merupakan salah satu dampak akhir yang terbentuk dari suatu usaha diplomasi ataupun kebijakan luar negeri yang diambil. Citra positif adalah hal yang perlu dibangun oleh Indonesia di mata dunia internasional. Adanya citra positif yang terbentuk akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional, sehingga dapat menempatkan posisi Indonesia sebagai negara yang positif dalam berbagai aspek kehidupan. Faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap citra meliputi isu-isu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan

keamanan. Oleh karena itu, isu-isu tersebut harus dapat dikelola dengan baik oleh Indonesia. Pemberitaan positif dan negatif tentunya akan berpengaruh terhadap mindset publik terhadap Indonesia, sehingga strategi dalam mengelola dan menangani media perlu dilakukan oleh Indonesia.

Analisis IK S2.1

Indeks citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Muscat

Citra Indonesia yaitu persepsi yang dipercayai/diyakini aktor lain terhadap Indonesia yang didasarkan kepada pola perilaku yang ditunjukkan Indonesia dalam pergaulan internasional. Pola perilaku tersebut terbangun berdasarkan power yang dimiliki baik yang bersifat hard maupun soft. Citra juga merupakan salah satu dampak akhir yang terbentuk dari suatu usaha diplomasi ataupun kebijakan luar negeri yang diambil. Citra positif adalah hal yang perlu dibangun oleh Indonesia di mata dunia internasional. Adanya citra positif yang terbentuk akan meningkatkan kepercayaan dunia internasional, sehingga dapat menempatkan posisi Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dalam berbagai aspek kehidupan.

Ruang Lingkup:
Indeks Citra adalah Indeks yang mengukur kesan atau pandangan dunia internasional terhadap negara Indonesia.
Indeks Citra Indonesia diperoleh berdasarkan survei yang mengukur 3 dimensi, yaitu TOURISM & SOCIO-CULTURE, ECONOMY, dan GOVERNANCE AND RULE OF LAW. Sumber data didapatkan berdasarkan hasil kuesioner yang sudah diolah pada aplikasi pengelolaan data citra Indonesia di dunia internasional (https://citraindonesia.kemlu.go.id). Kuesioner disebarkan oleh seluruh Perwakilan RI di Luar Negeri kecuali Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) dengan responden Warga Negara Asing di negara akreditasi/wilayah kerja. Negara Akreditasi/wilayah kerja adalah tempat kedudukan Perwakilan RI beserta negara akreditasi/wilayah kerja rangkapan yang dimandatkan secara resmi untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah RI.

Responden merupakan WNA di negara akreditasi/wilayah kerja yang mengetahui Indonesia. Adapun jumlah minimal responden pada setiap perwakilan ditentukan berdasarkan status perwakilan (minimal Triwulan I: 25 responden, Triwulan II: 25 responden, Triwulan III: 25 responden, Triwulan IV: 25 responden, dan Tahunan: 100 responden, untuk setiap perwakilan, kecuali untuk perwakilan kategori rawan dan berbahaya) dan dengan teknik pengambilan sampel sesuai metodologi survei yang digunakan. Adapun nilai Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional per-Triwulan bersifat kumulatif sesuai dengan jumlah total responden dan jawaban survei dari awal penyelenggaraan survei pada tahun berjalan sampai dengan akhir tiap triwulan.

Adapun wilayah kerja yang menjadi objek perhitungan adalah Oman dan Yaman.

Indeks Citra Indonesia:

Interval	Kategori Indeks
4,21 - 5,00	Sangat Baik
3,41 - 4,20	Baik
2,61 - 3,40	Cukup
1,81 - 2,60	Kurang
1,00 - 1,80	Tidak Baik

Batasan Waktu:
Indeks Citra dihitung berdasarkan hasil pengukuran selama satu tahun anggaran, yang juga diukur secara periodik triwulanan.

Informasi Kinerja

Tabel III.7

Capaian IK S2.1 Indeks citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Muscat

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai Capaian SUB IK*)	Nilai Bobot **)
Indeks citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Muscat			
Realisasi			**4,46**
Target			**4,10**
Capaian			**108,78%**
Batas Toleransi*)** (jika capaian melebihi 120%)			**N/A**

Pada tahun 2025, realisasi IK S2.1 “Indeks citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Muscat” tercatat sebesar 4,46, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 4,10. Dengan demikian, capaian IK mencapai 108,78.

Realisasi IK S2.1 diperoleh dari data survey citra Indonesia di Dunia Internasional yang dilakukan oleh Perwakilan RI, dengan menggunakan database website melalui tautan https://citraindonesia.kemlu.go.id.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.8

Target, Realisasi, dan Capaian IK Indeks citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Muscat

Kode IK/ SUB IK		2023	2024	2025
S1.1	Target	3,95	4,07	4,10
	Realisasi	4,65	4,50	4,46
	Capaian	117,72	110,57	108,78

Target IK “IK Indeks citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Muscat” tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi 4,10 dari yang sebelumnya 4,07 pada tahun 2024. Target tahun 2025 ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan realisasi dan capaian IK Tahun 2024 yang melampaui target.

Realisasi IK ini mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 4,46 dari sebelumnya 4,50 pada tahun 2024 dikarenakan penurunan Indeks Citra Dari 4.5 menjadi 4.46 disebabkan menurunnya jumlah responden yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi jawaban bernada positif pada lembar survei.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Sejumlah program strategis telah dilaksanakan oleh KBRI Muscat sepanjang tahun 2025 dan dalam rangka mendukung realisasi IK untuk mendukung peningkatan citra Indonesia, telah dilaksanakan beberapa program strategis mendukung diplomasi ekonomi dan budaya termasuk *engagement* dengan WNA di negara akreditasi.

Analisis Program yang mendukung Capaian

Sejumlah program/kegiatan selama periode 2025 telah dilaksanakan guna mendukung capaian indeks citra Indonesia terutama melalui promosi ekonomi, budaya dan pariwisata, antara lain:

1. Memperluas jangkauan responden
2. Menetapkan target responden

Kendala dan Tantangan

Walaupun KBRI Muscat berhasil mencapai target IK S.2.1 pada tahun 2025, tercatat sedikit penurunan capaian hasil survey citra Indonesia di negara akreditasi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan masih terdapat tantangan yang harus diperhatikan berupa:

1. Target responden yang minim
2. Kendala jangkauan responden /jarak terutama untuk negara akreditasi rangkapan (Yaman)

Upaya Perbaikan/Antisipasi

KBRI Muscat telah melakukan upaya antisipasi untuk mempertahankan capaian IK S.2.1 dan mengurangi dampak /kendala yang ada sehingga IK dapat tetap tercapai, antara lain:

1. Memperluas networking untuk menambah jumlah responden
2. Menjajaki metode lain agar angket survey dapat menjangkau berbagai kalangan, termasuk Yaman
3. Menyederhanakan pengisian survey

Dokumentasi

Gambar III.9



Promosi Budaya mengundang Komunitas perempuan asing di Muscat, Oman

Gambar III.10



Business Matching Promosi Pariwisata 2025

Customer Perspective

C1 Pelindungan WNI dan Pelayanan Publik KBRI Muscat yang Prima

Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia di luar negeri.

Pelindungan terhadap WNI di Luar Negeri mencakup penyediaan bantuan informasi, hukum dan/atau sosial. Prinsip yang diterapkan dalam upaya pelindungan WNI sesuai Permenlu No 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan WNI di luar negeri, yaitu :

1. Mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata WNI;
3. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hukum negara setempat serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pelayanan publik yang prima meliputi kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Perwakilan RI.

Masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri membutuhkan pelayanan dan pelindungan yang responsif, cepat, tanggap, transparan dan akuntabel, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sasaran strategis pelindungan WNI di Luar Negeri dan pelayanan publik yang prima bertujuan memastikan pencapaian kinerja dalam upaya yang dilakukan oleh Kemenlu RI untuk melindungi warga negara yang berada di Luar Negeri sesuai

dengan Hukum Internasional dan kualitas pelayanan publik terkait keprotokolan, kekonsuleran, fasilitas diplomatik dan pelindungan WNI..

Analisis IK C1.1

Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Muscat yang diselesaikan

Penyelesaian kasus adalah upaya penanganan masalah terkait WNI di luar negeri yang dapat ditempuh melalui pendekatan diplomasi, upaya hukum, penyelesaian di luar pengadilan, mediasi, fasilitasi, maupun langkah-langkah lain sesuai peraturan perundang-undangan nasional, hukum negara setempat dan kebiasaan internasional melalui proses yang tercatat dalam Portal Peduli WNI.

Kasus WNI di luar negeri yang diselesaikan mencakup kasus khusus dan kasus umum yang ditangani Perwakilan RI di Luar Negeri.

Kasus Khusus adalah kasus WNI di luar negeri yang berdasarkan asesmen Perwakilan dan/atau Pusat dikategorikan sebagai high profile case. High profile case didefinisikan sebagai kasus yang menuntut penanganan intensif karena menyangkut keselamatan jiwa dan/atau sensitivitas isu pada publik dan/atau bobot substansi kasus dan/atau yang berdampak masif dan/atau menyangkut kepentingan nasional bidang politik/keamanan/sosial/ketertiban masyarakat maupun alasan kekhususan lainnya. KK dapat berupa namun tidak terbatas pada WNI terancam hukuman mati, pelaku atau korban pembunuhan, pelaku atau korban penyiksaan fisik berat, korban/terindikasi korban TPPO, kasus terorisme, pengedar narkoba/anggota sindikat narkoba, kasus melibatkan anak (WNI berusia hingga 18 tahun), dan evakuasi kedaruratan WNI.

Kasus Umum adalah kasus WNI di luar negeri di luar Kasus Khusus.

Ruang lingkup:
Komponen Kasus WNI di Luar Negeri terdiri dari:
1. Persentase Kasus Khusus yang diselesaikan, dengan bobot: 55 %
2. Persentase Kasus Umum yang diselesaikan, dengan bobot: 45 %

Pertimbangan pembobotan didasarkan pada tingkat urgensi, kompleksitas, dan sumber daya dalam penanganan dalam penyelesaian kasus WNI di Luar Negeri.

Kasus Khusus yang Selesai/ Kasus Umum yang Selesai adalah kasus khusus/umum yang telah ditangani dan memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria berikut:
a) Untuk kasus hukum, telah mendapatkan keputusan hukum yang ditetapkan otoritas setempat dan/atau kesepakatan di luar pengadilan yang diterima para pihak terkait;
b) Untuk kasus non hukum, telah dilaksanakan seluruh langkah penanganan secara ekshaustif sesuai informasi bukti yang tersedia dengan melalui prosedur administratif, hukum, upaya diplomatik dan/atau upaya lain sesuai

ketentuan nasional, hukum negara setempat, dan/atau kebiasaan internasional yang berlaku terkait pemenuhan hak-hak WNI di luar negeri;

c) Apabila WNI korban menyatakan secara tertulis untuk tidak melanjutkan kasusnya;
d) Dalam kondisi tertentu dimana secara rasional tidak dimungkinkan terpenuhi kriteria (a) dan/atau (b) dan/atau (c) di atas, Pejabat yang berwenang di Perwakilan dan/atau Pusat dapat memutuskan suatu kasus selesai/tuntas (case closed) secara administratif sesuai ketentuan Indonesia atau ketentuan negara setempat.

Kasus Khusus yang Ditangani/ Kasus Umum yang Ditangani adalah kasus khusus/umum yang diterima dan ditangani pada tahun berjalan.

Penghitungan jumlah kasus merujuk pada jumlah persoalan yang dihadapi oleh seorang WNI. Seorang WNI dapat menghadapi beberapa kasus yang berbeda secara bersamaan. Contohnya: Pekerja Migran Indonesia mengadukan persoalan mengalami kekerasan fisik oleh Pemberi Kerja dan ternyata hak gajinya tidak penuhi serta telah melampuai izin tinggalnya. Dalam hal ini, WNI dimaksud memiliki 3 kasus yang berbeda. Pembedaan kasus diperlukan mengingat penanganan kasus-kasus tersebut didasarkan oleh prosedur/SOP, peraturan nasional, setempat dan internasional yang berbeda dengan target penyelesaian yang berbeda juga. Penyelesaian 3 kasus tersebut dapat terjadi tidak bersamaan karena terkait dengan pihak-pihak lain, seperti: pihak kepolisian, imigrasi, dan Kemenlu di Indonesia dan negara setempat.

Batasan waktu:
Penghitungan kasus WNI yang diselesaikan mencakup kasus yang ditangani dan diselesaikan selama satu tahun anggaran (Januari-Desember), yang juga diukur secara periodik triwulanan.

Informasi Kinerja

Tabel III.9

Capaian IK C1.1 Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Muscat yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai Capaian SUB IK*)	Nilai Bobot **)
Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Muscat yang diselesaikan			

Realisasi	**100,00**
Target	**90,00**
Capaian	**111,11**
Batas Toleransi*)** (jika capaian melebihi 120%)	**N/A**

Pada tahun 2025, realisasi IK C1.1 “Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Muscat yang diselesaikan” tercatat sebesar 100,00, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 90,00. Dengan demikian, capaian IK mencapai 111,11.

Sepanjang tahun 2025, KBRI Muscat telah menangani sekitar 843 kasus WNI yang mayoritas melibatkan WNI yang bekerja di sektor domestik, dengan presentase penyelesaian secara keseluruhan (kasus umum dan kasus khusus) sebesar 100%. Jumlah tersebut termasuk evakuasi WNI dari Yaman Utara, pemulangan WNI, penyelesaian kasus TPPO, kasus ketenagakerjaan, kasus keimigrasian, pendampingan WNI sakit, pemulangan jenazah, penipuan, dan ABK (Anak Buah Kapal).

Peningkatan penanganan kasus pada tahun 2025 dikarenakan diterapkannya program amnesti oleh Pemerintah Oman bagi pemegang visa kunjungan yang telah *overstay* dan pemegang visa kerja yang telah dilaporkan oleh kaburan oleh majikan. KBRI berperan dalam memfasilitasi pendaftaran amnesti kepada Kemenaker Oman serta pemulangan ke Indonesia.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.10

Target, Realisasi, dan Capaian IK Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Muscat yang diselesaikan

Kode IK/ SUB IK		2023	2024	2025
C1.1	Target	90,00	90,00	90,00

Realisasi	**98,80**	**99,00**	**100,00**
Capaian	**109,78**	**99,50**	**111,11**

Target IK "Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Muscat yang diselesaikan**"** tahun 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan target pada tahun 2024 yaitu 90. Hal ini dikarenakan belum terpetakannya kenaikan jumlah kasus yang ditangani karena amnesti ditetapkan oleh Pemerintah Oman pada bulan April 2025.

Realisasi IK ini mengalami kenaikan pada tahun 2025 menjadi 100,00 dari sebelumnya 99,00 pada tahun 2024 dikarenakan penyelesaian kasus yang lebih mudah dibanding tahun 2024 dengan adanya amnesti.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Pencapaian realisasi pada kasus WNI yang diselesaikan dikarenakan koordinasi yang dilaksanakan oleh KBRI Muscat dengan pihak-pihak terkait di Oman (Kementerian Luar Negeri Oman, Kementerian Ketenagakerjaan Oman, Kepolisian Oman) dan Yaman (Kementerian Luar Negeri Yaman, Kepolisian Yaman, Satgas Perlindungan WNI di Yaman, dan institusi pendidikan yang ada di Yaman) sehingga kasus-kasus WNI dapat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.

Pencapaian realisasi juga didukung oleh penetapan amnesti oleh Pemerintah Oman bagi *overstayer* dan pemegang visa kerja dengan status kaburan pada bulan April – Desember 2025. Program amnesti ini telah diikuti oleh WNI *overstayer*/kaburan dalam jumlah signifikan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan jumlah kasus yang ditangani dan penanganan kasus oleh KBRI Muscat.

KBRI Muscat juga telah melaksanakan evakuasi WNI dari Yaman Utara pada bulan Mei dan Juli 2025 akibat eskalasi konflik di Yaman Utara.

Analisis Program yang mendukung Capaian

Sejumlah program strategis yang telah dilaksanakan oleh KBRI Muscat sepanjang tahun 2025 untuk mendukung pelaksanaan penanganan kasus WNI di negara akreditasi KBRI Muscat yaitu:

1. Sepanjang tahun 2025, KBRI Muscat telah menerima 843 kasus permasalahan WNI yang mayoritas melibatkan WNI yang bekerja di sektor domestik, dengan presentase penyelesaian secara keseluruhan (kasus umum dan kasus khusus) sebesar 99 %. Jumlah tersebut termasuk pemulangan WNI, penyelesaian

kasus TPPO, kasus ketenagakerjaan, kasus keimigrasian, pendampingan WNI sakit, pemulangan jenazah, penipuan, ABK (Anak Buah Kapal).

2. Fasilitasi pendaftaran dan pengecekan status amnesti bagi WNI pengaju amnesti kepada Kemenaker Oman.

3. Pelaksanaan evakuasi WNI dari Yaman Utara ke Indonesia pada bulan Mei dan Juli 2025 akibat eskalasi konflik di Yaman Utara.

4. KBRI Muscat memantau dan merespon pengaduan WNI melalui nomor hotline KBRI Muscat selama 24 jam.

5. Telah diselenggarakan sejumlah sosialisasi pelayanan kekonsuleran bagi WNI di Oman dan Yaman:
   - Sosialisasi Kekonsuleran dan Pelindungan WNI di Salalah, Oman, 28 – 29 Januari 2025
   - Sosialisasi Kekonsuleran dan Pelindungan WNI di Yaman, 19 – 24 April 2025
   - Sosialisasi Kekonsuleran dan Pelindungan WNI di Sohar, Oman, 3 – 5 Juli 2025
   - Sosialisasi Kekonsuleran dan Pelindungan WNI di Salalah, Oman, 22 – 25 Agustus 2025
   - Sosialisasi Kekonsuleran dan Pelindungan WNI di Yaman, 29 Agustus – 8 September 2025
   - Sosialisasi Kekonsuleran dan Pelindungan WNI di Buraimi, Oman, 30 Oktober – 1 November 2025
   - Sosialisasi Kekonsuleran, Ketenagakerjaan, Pelindungan WNI di Muscat, Oman, 5 Desember 2025
   - Sosialisasi Kekonsuleran dan Pelindungan WNI di Yaman, 8 – 15 Desember 2025

   Sosialisasi disambut baik oleh WNI dengan banyaknya partisipasi WNI dari berbagai kota di Oman dan Yaman. Hal tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman WNI terhadap pelayanan pelindungan yang dimiliki KBRI Muscat dan himbauan dalam mematuhi peraturan dan ketentuan di Oman dan Yaman. Sosialisasi perlu diperluas jangkauannya ke berbagai kota di Oman dan Yaman agar dapat meningkatkan pemahaman PMI.

Kendala dan Tantangan

Walaupun KBRI Muscat berhasil mencapai target IKU C1.1 pada tahun 2025, terdapat sejumlah faktor eksternal yang menjadi kendala dan tantangan dalam menangani kasus WNI. Kendala dan tantangan tersebut yakni:

1. Masih minimnya pengetahuan PMI terhadap peraturan ketenagakerjaan dan keimigrasian di negara akreditasi KBRI Muscat.

2. Masih adanya PMI yang bekerja di Oman tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku antara lain dengan menggunakan visa turis/wisata untuk bekerja.
3. Banyaknya jumlah WNI yang bekerja di agensi ketenagakerjaan di Oman yang mempermudah pengiriman WNI ke Oman secara unprosedural.
4. Pemerintah Oman membuka konversi visa turis menjadi visa kerja termasuk visa *housemaid* sejak awal tahun 2025 sehingga berdampak terhadap jumlah peningkatan PMI di sektor domestik. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah PMI yang bermasalah seperti PMI kabur sebelum kontrak kerja berakhir dan meminta kepulangan. Majikan/agensi pada umumnya menahan paspor mereka sedangkan pemegang visa kerja memerlukan paspor mereka untuk dapat diizinkan melakukan perjalanan keluar Muscat oleh pihak Imigrasi Oman di bandara.

Serupa dengan tahun 2024, faktor internal yang mempengaruhi penanganan kasus WNI yaitu minimnya jumlah pegawai setempat yang memiliki tugas khusus untuk pelindungan WNI. KBRI Muscat saat ini hanya memiliki 1 (satu) pegawai setempat yang menangani secara khusus kasus WNI.

Upaya Perbaikan

KBRI Muscat telah melakukan upaya-upaya perbaikan dalam menanggulangi kendala dan tantangan dalam penanganan kasus WNI seperti: i) pelaksanaan sosialisasi pelayanan kekonsuleran dan pelindungan WNI secara rutin, ii) pembentukan dan pemantauan jadwal piket penanggap *hotline* secara rutin, iii) mempekerjakan tenaga harian lepas untuk mendukung penanganan kasus WNI.

Proyeksi Kedepan

Dalam hal sumber daya manusia, KBRI Muscat masih akan berupaya untuk mengusulkan penambahan pegawai setempat dalam penanganan kasus. Dalam tahun 2025, KBRI Muscat telah mempekerjakan 1 tenaga harian lepas tambahan untuk membantu penanganan kasus WNI.

KBRI Muscat juga akan memperbanyak frekuensi pelaksanaan sosialisasi baik dalam segi waktu dan lokasi dengan mempertimbangkan anggaran pada tahun berjalan.

KBRI Muscat akan mempererat koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Oman dan Yaman dalam penanganan kasus WNI.

Dokumentasi

Gambar III.11



Sosialisasi Duta Besar RI Muscat terkait kekonsuleran dan pelindungan WNI kepada anggota PPI Yaman, 4 September 2025

Gambar III.12



Peserta evakuasi gelombang 1 WNI di Yaman Selatan bersama PF Politik dan Konsuler KBRI Muscat, Tarim, 21 Mei 2025

Gambar III.13



Duta Besar RI Muscat dan PF Konsuler KBRI Muscat bersama PMI peserta amnesti, Muscat, 27 Mei 2025

Analisis IK C1.2

Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI Muscat

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik merepresentasikan penilaian persepsi terhadap kepuasan atas kualitas pelayanan publik Kementerian Luar Negeri yang diberikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.

Kekonsuleran adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh hukum nasional dengan memperhatikan hukum negara mitra serta kebiasaan dan hukum internasional yang mencakup, namun tidak terbatas pada layanan kependudukan, notariat, kehakiman, keimigrasian, dan ketenagakerjaan. Pelayanan publik dalam lingkup kekonsuleran mencakup layanan terkait pengurusan paspor, visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali, perizinan penerbangan, perkapalan, legalisasi dan jasa konsuler warga negara asing.

Ruang lingkup:

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran diperoleh melalui survei (manual dan/atau elektronik) kepada responden yang sedang/telah menerima pelayanan kekonsuleran. Penentuan Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran merujuk Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei dilakukan dengan responden sebagai berikut :

Orang/Perusahaan, Staf/Pejabat Kementerian/Lembaga, Organisasi Internasional, Pemda setempat dan Perwakilan Negara Asing.

Batasan waktu:

Nilai persepsi dihitung berdasarkan pengukuran selama satu tahun anggaran, yang juga diukur secara periodik triwulanan.

Tabel Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran

Nilai Persepsi	Nilai Interval Indeks	Nilai Internal Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat Baik

Jumlah responden survei merujuk pada Lampiran II Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan tabulasi pengambilan sampel Morgan dan Krejce sebagai berikut:

Tabel 1 Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367

Informasi Kinerja

Tabel III.11

Capaian IK C1.2 Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI Muscat

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai Capaian SUB IK*)	Nilai Bobot **)
Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI Muscat			
Realisasi			**4,00**
Target			**4,00**
Capaian			**100,00**
Batas Toleransi*)** (jika capaian melebihi 120%)			**N/A**

Pada tahun 2025, realisasi IK C1.2 “Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI Muscat” tercatat sebesar 4,00, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 4,00. Dengan demikian, capaian IK mencapai 100,00.

Nilai persepsi kepuasaan pelayanan kekonsuleran KBRI Muscat diperoleh dari responden survei yang mengajukan pelayanan kekonsuleran di loket konsuler KBRI Muscat. Responden yang diperoleh dalam pengisian yaitu berjumlah sekitar 978 orang dengan indeks kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI Muscat pada tahun 2025 adalah sebesar 4,00 dalam kategori “Baik”.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.12

Target, Realisasi, dan Capaian IK Nilai persepsi kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI Muscat

Kode IK/ SUB IK	2023	2024	2025

C1.1	Target	4,00	4,00	4,00
	Realisasi	3,96	3,98	4,00
	Capaian	99,00	99,50	100,00

Target IK "Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Muscat yang diselesaikan" tahun 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan target pada tahun 2024 yaitu 90. Hal ini dikarenakan belum terpetakannya kenaikan jumlah kasus yang ditangani karena amnesti ditetapkan oleh Pemerintah Oman pada bulan April 2025.

Realisasi IK ini mengalami kenaikan pada tahun 2025 menjadi 100,00 dari sebelumnya 99,00 pada tahun 2024 dikarenakan penyelesaian kasus yang lebih mudah dibanding tahun 2024 dengan adanya amnesti.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Persepsi positif WNI terhadap pelayanan kekonsuleran dapat diperoleh karena KBRI Muscat berhasil memenuhi permintaan para pemohon pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Analisis Program yang mendukung Capaian

Sejumlah program strategis telah dilaksanakan oleh KBRI Muscat sepanjang tahun 2025 untuk dapat memperoleh persepsi positif terhadap pelayanan kekonsuleran yaitu:

1. KBRI Muscat aktif 24 jam memantau dan merespon permintaan pelayanan kekonsuleran melalui nomor *hotline* KBRI Muscat.
2. KBRI Muscat rutin melaksanakan warung konsuler di berbagai kota di Oman dan Yaman.
3. Selama tahun 2024, pelayanan konsuler berlangsung setiap hari kerja dan melayani sekitar 3.048 permintaan penerbitan dan legalisasi dokumen.

Kendala dan Tantangan

Perolehan jumlah responden yang bersedia untuk meluangkan waktu mengisi survei saat pengajuan pelayanan di loket konsuler tidak mudah dilakukan.

Upaya Perbaikan

KBRI Muscat telah berupaya untuk mendorong minat responden dalam mengisi survei saat pengajuan pelayanan di loket konsuler.

Proyeksi Kedepan

KBRI Muscat akan mempertahankan dan meningkatkan pelayanan kekonsuleran dengan baik agar persepsi positif WNI dapat dipertahankan.

Analisis IK C1.3

Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI KBRI Muscat

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik merepresentasikan penilaian persepsi terhadap kepuasan atas kualitas pelayanan publik Kementerian Luar Negeri yang diberikan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan.

Pelindungan WNI merupakan segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia di luar negeri. Pelayanan terkait pelindungan WNI di luar negeri mencakup pemberian layanan dalam penanganan kasus atau pemberian bantuan pelindungan lainnya, pemberian informasi melalui kampanye penyadaran publik, bimbingan teknis dan FGD.

Ruang lingkup:

Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI diperoleh melalui survei (manual dan/atau elektronik) kepada responden yang sedang/telah menerima pelayanan Pelindungan WNI. Pelayanan terkait pelindungan WNI di luar negeri mencakup pemberian layanan dalam penanganan kasus, pemberian informasi melalui kampanye penyadaran publik, bimbingan teknis dan FGD. Penentuan Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran merujuk Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei dilakukan dengan responden yaitu orang/penerima jasa pelayanan Pelindungan WNI.

Batasan waktu:

Nilai persepsi dihitung berdasarkan pengukuran selama satu tahun anggaran, yang juga diukur secara periodik triwulanan.

Tabel Nilai Persepsi Pelayanan Pelindungan WNI:

Nilai Persepsi	Nilai Interval Indeks	Nilai Internal Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat Baik

Jumlah responden survei merujuk pada Lampiran II Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan tabulasi pengambilan sampel Morgan dan Krejce sebagai berikut:

Tabel 1 Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367

Informasi Kinerja

Tabel III.13

Capaian IK C1.3 Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI KBRI Muscat

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai Capaian SUB IK*)	Nilai Bobot **)
Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI KBRI Muscat			
Realisasi			**4,00**

Target	**4,00**
Capaian	**100,00**
Batas Toleransi*)** (jika capaian melebihi 120%)	**N/A**

Pada tahun 2025, realisasi IK C1.3 “Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI KBRI Muscat” tercatat sebesar 4,00, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 4,00. Dengan demikian, capaian IK mencapai 100,00.

Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI KBRI Muscat diperoleh dari responden survei yang mengajukan pelindungan kepada KBRI Muscat. Responden yang diperoleh dalam pengisian yaitu berjumlah sekitar 238 orang dengan indeks kepuasan pelayanan kekonsuleran KBRI Muscat pada tahun 2024 adalah sebesar 4,00 dalam kategori “Baik”.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.14

Target, Realisasi, dan Capaian IK Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI KBRI Muscat

Kode IK/ SUB IK		2023	2024	2025
C1.1	Target	4,00	4,00	4,00
	Realisasi	3,94	3,98	4,00
	Capaian	98,50	99,50	100,00

Target IK “Nilai persepsi kepuasan pelayanan pelindungan WNI KBRI Muscat” tahun 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan target pada tahun 2024 yaitu 4,00. Hal ini dikarenakan target telah ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri RI untuk seluruh Perwakilan RI.

Realisasi IK ini mengalami kenaikan pada tahun 2025 menjadi 4,00 dari sebelumnya 3,98 pada tahun 2024 dikarenakan semakin banyak responden yang mengisi survei dengan predikat baik.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Persepsi positif WNI terhadap pelindungan WNI dapat diperoleh karena KBRI Muscat berhasil menangani sebagian besar kasus WNI.

Analisis Program yang mendukung Capaian

Sejumlah program strategis telah dilaksanakan oleh KBRI Muscat sepanjang tahun 2025 untuk dapat memperoleh persepsi positif terhadap pelindungan WNI yaitu:

1. KBRI Muscat aktif 24 jam memantau dan merespon pengaduan dari WNI melalui nomor *hotline* KBRI Muscat.
2. KBRI Muscat memiliki penampungan bagi PMI yang memerlukan pelindungan. Disamping pendampingan penyelesaian kasus, KBRI Muscat memberikan dukungan logistik bagi penghuni penampungan.

Kendala dan Tantangan

PMI yang bermasalah mengharapkan kasusnya dapat diselesaikan dengan segera oleh KBRI Muscat. Namun, pada kenyataannya, KBRI Muscat perlu berkoordinasi dengan berbagai lembaga serta mengikuti prosedur penyelesaian kasus yang berlaku.

Upaya Perbaikan

KBRI Muscat telah melakukan upaya-upaya perbaikan untuk memperoleh persepsi positif WNI terhadap pelindungan WNI yang dilakukan oleh KBRI Muscat seperti: i) pelaksanaan sosialisasi pelayanan kekonsuleran dan pelindungan WNI secara rutin, ii) pembentukan dan pemantauan jadwal piket penanggap *hotline* secara rutin, dan iii) koordinasi lebih erat dan rutin dengan pihak-pihak terkait di Oman dan Yaman dalam penyelesaian kasus WNI.

Proyeksi Kedepan

KBRI Muscat akan mempertahankan dan meningkatkan pelindungan WNI dengan baik agar persepsi positif WNI dapat dipertahankan.

Internal Business Process Perspective

B1 Diplomasi Bilateral di Negara Akreditasi KBRI Muscat yang Kuat

Sasaran strategis ini berfokus pada pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan diplomasi bilateral. Relasi bilateral perlu didorong untuk bersifat mutualistik, yakni di satu sisi dapat memastikan terjaganya kepentingan Indonesia, dan di sisi lain, relasi tersebut mampu memberikan manfaat bagi keduabelah pihak. Hubungan bilateral mencakup sejumlah bidang, yakni ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan, serta maritim. Dalam dinamika relasi antar negara, kepentingan Indonesia di bidang tersbut diperjuangkan melalui diplomasi bilateral. Sejumlah hal menyangkut kepentingan Indonesia dapat diiusulkan, dan selanjutnya dibahas melalui proses negosiasi dan perundingan. Kinerja terkait sasaran strategis ini adalah keberhasllan mencapai kesepakatan yang memberikan *assurance* terhadap terjaganya kepentingan Indonesia dalam hubungan antar negara. Sasaran strategis ini mencerminkan prioritas strategis yang mesti dicapai oleh Perwakilan RI dalam rangka relasi bilateral dengan negara akreditasi yang menjadi naungan Perwakilan.

Diplomasi Bilateral adalah pelaksanaan kebijakan diplomasi dalam bidang hubungan luar negeri secara bilateral.

Kuat adalah adalah teguh, tidak mudah goyah dan mempunyai keunggulan.

Analisis IK B1.1

Jumlah kesepakatan yang dihasilkan dengan negara akreditasi KBRI Muscat

Kesepakatan adalah seluruh bentuk perjanjian tertulis antara Indonesia dengan negara lain (baik pemerintah, swasta, universitas, pelaku bisnis atau pihak lainnya) yang difasilitasi oleh Perwakilan RI.

Ruang lingkup:

Kesepakatan bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan sektor lainnya merupakan kesepakatan yang dihasilkan dalam negosiasi, perundingan, diskusi, pertemuan, dan komunikasi yang bersifat landasan/payung hukum dan tidak memiliki monetary value.

Batasan waktu:

Kesepakatan yang dapat diklaim sebagai realisasi adalah kesepakatan yang diperoleh/ditetapkan pada satu tahun anggaran (Januari-Desember).

Informasi Kinerja

Tabel III.15

Capaian IK B1.1 Jumlah kesepakatan yang dihasilkan dengan negara akreditasi KBRI Muscat

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai Capaian SUB IK*)	Nilai Bobot **)
Jumlah kesepakatan yang dihasilkan dengan negara akreditasi KBRI Muscat			
Realisasi			**1,00**
Target			**1,00**
Capaian			**100,00**
Batas Toleransi*)** (jika capaian melebihi 120%)			**N/A**

Pada tahun 2025, realisasi IK B1.1 “Jumlah kesepakatan yang dihasilkan dengan negara akreditasi KBRI Muscat” tercatat sebesar 1,00, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 1,00. Dengan demikian, capaian IK mencapai 100,00.

Jumlah kesepakatan yang dihasilkan dengan negara akreditasi KBRI Muscat diperoleh dari kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Indonesia dan negara akreditasi KBRI Muscat. Pada tanggal 24 November 2025, Konsultasi Politik Kedua Indonesia-Oman telah dilaksanakan. Dalam kesempatan dimaksud, telah ditandatangani Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas Indonesia-Oman.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.16

Target, Realisasi, dan Capaian IK Jumlah kesepakatan yang dihasilkan dengan negara akreditasi KBRI Muscat

Kode IK/ SUB IK		2023	2024	2025
C1.1	Target	1,00	1,00	1,00

Realisasi	**0,50**	**1,00**	**1,00**
Capaian	**50,00**	**100**	**100,00**

Target IK “Jumlah kesepakatan yang dihasilkan dengan negara akreditasi KBRI Muscat” tahun 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan target pada tahun 2024 yaitu 1,00. Hal ini dikarenakan penandatanganan PBVDD Indonesia-Oman telah direncanakan sejak awal tahun 2025.

Realisasi IK pada tahun 2025 dan 2024 memiliki jumlah yang sama yaitu 1 kesepakatan. Pada tahun 2024, kesepakatan berupa perjanjian PBVDD masih dalam tahap pembahasan akhir sedangkan penandatanganan dilaksanakan pada tahun 2025.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

KBRI Muscat senantiasa berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pencapaian penandatanganan Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas yaitu Direktorat Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Oman.

Analisis Program yang mendukung Capaian

Pada tanggal 24 November 2025, telah dilaksanakan Konsultasi Politik Kedua Indonesia-Oman di Muscat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, Muhammad Anis Matta sedangkan delegasi Oman dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Kesultanan Oman, Sheikh Khalifa Alharthy.

Pada kesempatan dimaksud, telah ditandatangani Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas Indonesia-Oman oleh ketua delegasi masing-masing negara.

Upaya Perbaikan

KBRI Muscat telah melakukan pendekatan dengan Oman untuk menyesuaikan jadwal yang optimal untuk dihadiri kedua negara serta mendorong penyampaian tanggapan Oman terhadap kesepakatan.

Dokumentasi

Gambar III.14



Konsultasi Politik Kedua Indonesia-Oman, Muscat, 24 November 2025

Gambar III.15



Penandatanganan PBVDD RI-Oman

Analisis IK B1.2

Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan

Analisis potensi ekonomi tematik adalah informasi dan hasil analisis di bidang ekonomi yang bersifat tematik pada isu tertentu di sektor perdagangan, keuangan, investasi, pariwisata, atau jasa. Analisis tersebut disampaikan oleh Perwakilan RI sesuai kebutuhan, termasuk atas permintaan dari pemangku kepentingan.

Dimanfaatkan adalah analisis tersebut dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan bisnis.

Pemangku kepentingan adalah pihak yang berkepentingan di Indonesia diantaranya Pelaku Bisnis, Investor, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan lain sebagainya.

Ruang Lingkup:

Perwakilan RI menyampaikan analisis potensi ekonomi tematik kepada pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan menindaklanjuti hasil analisis tersebut dengan melakukan penjajakan, melaksanakan kegiatan promosi, atau upaya perluasan akses pasar/investasi lainnya. Perwakilan RI melakukan pemantauan atas pemanfaatan analisis potensi ekonomi tematik tersebut guna mengetahui jumlah analisis yang dimanfaatkan.

Batas waktu:

Analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pada satu tahun anggaran (Januari-Desember).

Informasi Kinerja

Tabel III.17

Capaian IK B1.2 Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai Capaian SUB IK*)	Nilai Bobot **)
Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan			

Realisasi	**2,00**
Target	**2,00**
Capaian	**100,00**
Batas Toleransi*)** (jika capaian melebihi 120%)	**N/A**

Pada tahun 2025, realisasi IK B1.2 “Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan” tercatat sebesar 2,00, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 2,00. Dengan demikian, capaian IK mencapai 100,00.

Analisis potensi ekonomi tematik yang disusun oleh KBRI Muscat yaitu: (i) analisis rencana pengajuan penambahan jumlah penerbangan ke Indonesia dan pengajuan penerbangan baru Muscat-Medan oleh Salam Air dan (ii) analisis partisipasi Kementerian Perindustrian RI dalam *Oman Health Exhibition and Conference*.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.18

Target, Realisasi, dan Capaian IK Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan

Kode IK/ SUB IK		2023	2024	2025
C1.1	Target	N/A	N/A	2,00
	Realisasi	N/A	N/A	2,00
	Capaian	N/A	N/A	100,00

Target IK “Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan” tahun 2025 baru diterapkan pada tahun 2025 sesuai arahan Kementerian Luar Negeri RI sebagai salah satu IK opsional. KBRI Muscat

mengadopsi IK ini dikarenakan KBRI Muscat telah memetakan rencana penyusunan analisis potensi ekonomi tematik yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IK

Keberhasilan pencapaian indikator didorong oleh pemilihan topik analisis yang sejalan dengan kebutuhan di negara akreditasi dan dengan program investor/asosiasi usaha di tanah air (demand-driven), ketersediaan data sektoral di negara akreditasi, serta proses konsultatif yang melibatkan pemangku kepentingan sejak tahap awal penyusunan.

Pencapaian target 100% didukung oleh beberapa faktor utama sebagai berikut:

a. Kesesuaian Tema dengan program pemerintah pusat
   Pemilihan tema analisis diselaraskan dengan isu prioritas dan kebutuhan pemerintah pusat sehingga menghasilkan tingkat pemanfaatan yang optimal.
b. Ketersediaan Data dan Informasi Sektoral
   Tersedianya data statistik dan administratif memungkinkan proses analisis dilakukan secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan pusat.
c. Kesesuaian dengan Kebutuhan Stakeholder (Demand-driven)
   Analisis disusun berdasarkan kebutuhan informasi yang nyata dari stakeholder terkait, sehingga produk akhir bersifat aplikatif dan dapat digunakan dalam proses perencanaan.

d. Diseminasi dan Komunikasi Hasil Analisis
   Penyampaian hasil analisis kepada pihak-pihak terkait melalui forum koordinasi dan dokumentasi resmi mendorong adopsi hasil analisis.

Analisis Program yang mendukung Capaian

1. Penyusunan laporan terkait pemenuhan kebutuhan produk terkait kesehatan di Oman baik peralatan kesehatan maupun obat-obatan.
2. Penyusunan laporan terkait potensi penambahan rute penerbangan Oman-Indonesia.

Kendala dan Tantangan

Analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan kerap menghadapi kendala pada aspek data, metodologi, serta kelembagaan. Di tingkat data, keterbatasan granularitas, ketidakteraturan siklus publikasi, dan fragmentasi sumber data di lintas lembaga membuat banyak potensi sektor bersifat prospektif tetapi sulit diukur dengan basis kuantitatif yang konsisten.

Di sisi pemanfaatannya, tantangan utama terletak pada kesenjangan antara temuan analitis dan implementasi kebijakan atau tindak lanjut bisnis. Laporan atau

kajian sering kali menghasilkan insight strategis, namun tidak diterjemahkan menjadi proposal aksi, matchmaking, atau pipeline proyek yang dapat dimonetisasi atau ditindaklanjuti.

Upaya Perbaikan

Dalam konteks diplomasi ekonomi, penguatan analisis potensi tematik dapat dilakukan melalui integrasi data lokal negara akreditasi, benchmarking regional, serta sinkronisasi narasi sektor dengan kebutuhan promosi investasi dan perdagangan Indonesia. Mekanisme konsultasi dengan otoritas lokal, pelaku industri, dan diaspora ekonomi dapat meningkatkan akurasi insight, sekaligus memperkaya persepsi terhadap peluang yang belum terpetakan.

Untuk pemanfaatannya, produk intelijen ekonomi perlu diturunkan ke format yang memperpendek jalur tindak lanjut seperti sector brief, peluang proyek konkret, dan business case yang siap dipresentasikan kepada investor atau mitra negara tujuan. Koordinasi lintas K/L dan nasional perlu diarahkan pada penyediaan focal point tematik, pengaturan pipeline tindak lanjut, serta pembakuan KPI berbasis outcome—misalnya jumlah deal, leads, atau inisiatif lanjutan—agar fungsi analisis benar-benar mendukung diplomasi ekonomi dan agenda promosi yang lebih terukur dan demand-driven.

Proyeksi Kedepan

Ke depan, analisis potensi ekonomi tematik diperkirakan semakin bersifat demand-driven, adaptif terhadap dinamika geopolitik dan teknologi, serta berbasis data yang lebih real-time. Fokusnya bergeser pada sektor-sektor baru seperti digital, energi transisi, ekonomi hijau/biru, dan rantai pasok strategis, sehingga informasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi dituangkan dalam bentuk business case yang konkret.

Dari sisi kelembagaan, kebutuhan terhadap focal point tematik, benchmarking internasional, dan mekanisme matchmaking pelaku usaha diproyeksikan semakin meningkat. Produk intelijen ekonomi pun bergeser dari sekadar informasi strategis menjadi instrumen promosi, diplomasi ekonomi, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat, terstandar, dan berorientasi hasil.

B2 Basis Data KBRI Muscat yang Akurat

Latar Belakang:

Dalam rangka mendukung pelaksanaan diplomasi dan politik luar negeri melalui perumusan kebijakan yang berdasarkan data dan informasi yang akurat (evidence-based policy), Kementerian Luar Negeri RI mendorong pelaksanaan pendataan, pemanfaatan sistem informasi dan penyusunan kajian/analisis diberbagai bidang. Perwakilan RI sebagai ujung tombak diplomasi di luar negeri,

memiliki peran penting dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pengolahan data dan informasi guna perumusan kebijakan politik luar negeri dimaksud. Penguatan basis data dan informasi di Perwakilan RI saat ini difokuskan namun tidak terbatas pada aspek Pelindungan WNI dan diplomasi ekonomi.

Basis data adalah suatu kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer dan dapat diperiksa, diolah, atau dimanipulasi secara sistematis menggunakan program komputer. Istilah “basis” mengacu pada tempat penyimpanan, sedangkan “data” merujuk pada fakta-fakta yang dikumpulkan.

Akurat adalah teliti; saksama; cermat; tepat benar.

Analisis IK B2.1

Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Muscat yang terverifikasi di Portal Peduli WNI

Portal Peduli WNI adalah sistem informasi pelayanan dan pelindungan terpadu bagi WNI di luar negeri yang telah diluncurkan oleh Presiden RI pada tahun 2018. Untuk mendukung kebijakan "Satu Data Indonesia", Portal Peduli WNI telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kemdagri (SIAK); Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian Kemkumham (SIMKIM); Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri BP2MI (SISKOTKLN) serta sistem pendataan dan pelayanan nasional lainnya.

Selain mendukung kebijakan "Satu Data Indonesia", jumlah WNI yang terdaftar pada Portal Peduli WNI dapat mempermudah proses pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri, dan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri secara lebih baik dan akurat.

Data pembanding/pembagi adalah data jumlah WNI yang telah lapor diri

Terverifikasi adalah WNI yang sudah terdaftar pada Portal Peduli WNI disertai dengan dokumen WNI yang diunggah oleh WNI sendiri dan/atau staf Perwakilan RI yang berwenang dan diverifikasi oleh Perwakilan RI.

WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.

Persentase jumlah WNI yang terdaftar di Portal Peduli WNI adalah persentase dari data WNI yang tercantum dan terverifikasi oleh Perwakilan RI di luar negeri pada Portal Peduli WNI dibanding jumlah lapor diri.

Perwakilan RI secara berkala melakukan pemutakhiran dan back-up data WNI atau master data dan juga melakukan update portal peduli WNI.

Master data adalah data yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan proses pengelolaan data pada portal peduli WNI.

Informasi Kinerja

Tabel III.19

Capaian IK B2.1 Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Muscat yang terverifikasi di Portal Peduli WNI

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai Capaian SUB IK*)	Nilai Bobot **)
Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Muscat yang terverifikasi di Portal Peduli WNI			
Realisasi			**100,00**
Target			**100,00**
Capaian			**100,00**
Batas Toleransi*)** (jika capaian melebihi 120%)			**N/A**

Pada tahun 2025, realisasi IK B2.1 “Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Muscat yang terverifikasi di Portal Peduli WNI” tercatat sebesar 100,00, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 100,00. Dengan demikian, capaian IK mencapai 100,00.

Realisasi IK ini diperoleh dari jumlah pengajuan Lapor Diri yang telah diverifikasi oleh KBRI Muscat di Portal Peduli WNI. Pada tahun 2025, KBRI Muscat telah memverifikasi seluruh pengajuan Lapor Diri yang dinilai sudah valid sesuai ketentuan yang berlaku.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.20

Target, Realisasi, dan Capaian IK Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Muscat yang terverifikasi di Portal Peduli WNI

Kode IK/ SUB IK		2023	2024	2025
C1.1	Target	90,00	100,00	100,00
	Realisasi	103,89	100,00	100,00
	Capaian	115,44	100,00	100,00

Target IK "Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Muscat yang terverifikasi di Portal Peduli WNI**"** tahun 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan target pada tahun 2024 yaitu 100,00. Hal ini dikarenakan target telah ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri RI untuk seluruh Perwakilan RI.

Realisasi IK pada tahun 2025 dan 2024 memiliki jumlah yang sama yaitu 100,00 dikarenakan KBRI Muscat melakukan verifikasi lapor diri untuk seluruh pengaju yang telah menyampaikan dokumen valid sesuai ketentuan.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

KBRI Muscat selalu melaksanakan pelayanan lapor diri bagi WNI saat melaksanakan sosialisasi dan warung konsuler di berbagai kota di Oman dan Yaman. Selain itu, KBRI Muscat memiliki *banner* tata cara pelaksanaan lapor diri di loket konsuler untuk mempermudah proses lapor diri.

Dalam melakukan verifikasi, KBRI Muscat rutin melakukan pengecekan Portal Peduli WNI agar seluruh WNI yang telah melaporkan diri khususnya bagi WNI yang menyampaikan data secara lengkap dapat terverifikasi.

Analisis Program yang mendukung Capaian

Sejumlah program strategis yang telah dilaksanakan oleh KBRI Muscat sepanjang tahun 2024 untuk mendukung proses verifikasi lapor diri WNI melalui Portal Peduli WNI yaitu:

1. Pelayanan lapor diri dalam setiap sosialisasi pelayanan kekonsuleran dan pelindungan WNI.
2. Pencetakan *banner* tata cara lapor diri dan penyimpanan *banner* di loket konsuler.

Kendala dan Tantangan

Walaupun KBRI Muscat berhasil mencapai target IKU B2.1 pada tahun 2025, jumlah WNI yang telah melakukan lapor diri masih belum mencapai jumlah keseluruhan WNI yang berada di Muscat. Hal ini antara lain disebabkan oleh sejumlah faktor eksternal yang menjadi kendala dan tantangan yakni:

- Kurang adanya kesadaran dari WNI terkait pentingnya melakukan lapor diri melalui Portal Peduli WNI untuk memperoleh pelayanan dan pelindungan WNI dari KBRI Muscat.
- Sebagian besar WNI di Oman merupakan PMI sektor domestik yang memiliki keterbatasan dalam memahami teknologi. Adapun untuk WNI di Yaman, terdapat keterbatasan akses internet.

Upaya Perbaikan

KBRI Muscat selalu melaksanakan pelayanan lapor diri bagi WNI saat melaksanakan sosialisasi dan warung konsuler di berbagai kota di Oman dan Yaman. Selain itu, KBRI Muscat memiliki banner tata cara pelaksanaan lapor diri di loket konsuler untuk mempermudah proses lapor diri.

Dalam melakukan verifikasi, KBRI Muscat rutin melakukan pengecekan Portal Peduli WNI agar seluruh WNI yang telah melaporkan diri khususnya bagi WNI yang menyampaikan data secara lengkap dapat terverifikasi.

Proyeksi Kedepan

Memberikan informasi dan himbauan kepada perusahaan yang mempekerjakan PMI agar pekerjanya dapat melakukan lapor diri setibanya di Oman. Selain itu, KBRI Muscat akan meningkatkan himbauan pelaksanaan lapor diri melalui media sosial dan saat melaksanakan warung konsuler di berbagai kota di Oman dan Yaman.

Analisis IK B2.2

Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang Negara Akreditasi KBRI Muscat

Data economic intelligence (DEI) adalah informasi dan kajian hasil analisis di bidang ekonomi (perdagangan, keuangan, investasi, pariwisata, dan jasa) termasuk informasi peluang produk spesifik yang bersifat strategis bagi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap negara akreditasi/wilayah kerja. DEI disusun dan dimutakhirkan secara berkala setiap tahun dari masing-masing negara akreditasi/wilayah kerja.

Ruang lingkup:

DEI antara lain mencakup Gambaran Umum Ekonomi Negara Akreditasi, Potensi Perdagangan,Pariwisata dan Investasi Negara Akreditasi, dan Kiat

Mengembangkan Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Negara Akreditasi, dan Kalender Kegiatan. Format DEI Perwakilan RI merujuk pada Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengelolaan DEI Kemenlu.

Nilai DEI adalah:

0 - 30 : Tidak sesuai

30,01-50 : Belum sesuai

50,01-70 : Cukup sesuai

70,01-90 : Sesuai

>90 : Sangat sesuai

Penilaian dilakukan oleh Ditjen Amerop untuk Perwakilan RI di kawasan Amerop dan Ditjen Aspasaf untuk Perwakilan RI di kawasan Aspasaf.

Batasan Waktu:

DEI periode observasi tahun sebelumnya disampaikan ke Pusat pada Triwulan I tahun berjalan.

Penilaian DEI diperoleh Perwakilan RI dari Pusat pada Triwulan III tahun berjalan.

Informasi Kinerja

Tabel III.21

Capaian IK B2.2 Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang Negara Akreditasi KBRI Muscat

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai Capaian SUB IK*)	Nilai Bobot **)
Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang Negara Akreditasi KBRI Muscat			
Realisasi			**92,00**
Target			**90,00**

Capaian	**102,22**
Batas Toleransi*)** (jika capaian melebihi 120%)	**N/A**

Pada tahun 2025, realisasi IK B2.2 “Nilai Laporan Data Economic Intelligence tentang Negara Akreditasi KBRI Muscat” tercatat sebesar 92,00, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 90,00. Dengan demikian, capaian IK mencapai 102,22.

Realisasi IK ini diperoleh dari Laporan Data Economic Intelligence tentang Negara Akreditasi KBRI Muscat yang disusun oleh KBRI Muscat. Merujuk brafaks R-05970/KEMLU/251107, KBRI Muscat memperoleh nilai 92,00.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.22

Target, Realisasi, dan Capaian IK Laporan Data Economic Intelligence tentang Negara Akreditasi KBRI Muscat

Kode IK/ SUB IK		2023	2024	2025
C1.1	Target	N/A	80,00	90,00
	Realisasi	N/A	90,00	92,00
	Capaian	N/A	112,50	102,22

Target IK “Laporan Data Economic Intelligence tentang Negara Akreditasi KBRI Muscat” tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi 90,00 dari sebelumnya 80,00 pada tahun 2024 dikarenakan realisasi dan capaian IK Tahun 2024 yang melampaui target, serta untuk memacu performa penyusunan laporan DEI dengan penetapan target yang menantang namun tetap achievable. Realisasi IK pada tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi 92,00 dari sebelumnya 90,00 pada tahun 2024.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian IK

Capaian kinerja indikator didukung oleh faktor utama sebagai berikut:

a. Kesesuaian Konten dengan Agenda Diplomasi Ekonomi Indonesia.
   Penekanan pada isu-isu prioritas seperti perdagangan, investasi, sektor energi, paritim, dan kerja sama komersial meningkatkan relevansi laporan terhadap kebutuhan kebijakan nasional.

b. Ketersediaan dan Akses Informasi Ekonomi Negara Akreditasi.
   Akses terhadap data resmi dari otoritas ekonomi dan lembaga statistik negara akreditasi memfasilitasi penyajian indikator makro dan sektoral dengan kualitas memadai.

c. Penguatan Metodologi Analisis
   Penggunaan pendekatan analitis berbasis data (*data-driven analysis*) dan *market intelligence* meningkatkan ketepatan informasi dan kedalaman substansi.

d. Ketepatan Waktu Penyampaian Produk Laporan.
   Kepatuhan terhadap jadwal pelaporan berkontribusi terhadap peningkatan penilaian indikator.

Kendala dan Tantangan

1. Informasi teknis pada sektor prospektif (hydrogen, green ammonia, mining, dan logistik) relatif sensitif dan memerlukan pendekatan *engagement* dengan pemangku kepentingan lokal.
2. Penyusunan laporan dilakukan paralel dengan tugas diplomasi ekonomi lainnya, sehingga memengaruhi kedalaman pengolahan data dan *forward-looking analysis*.

Upaya Perbaikan

- meningkatkan pemanfaatan data resmi dari lembaga Oman (MoF, MoCIIP, OIA, MDO, ASYAD, dan unit Vision 2040);
- memperluas akses pada publikasi sektor swasta, think-tank, serta lembaga riset internasional.
- memperdalam hubungan dengan otoritas ekonomi, *free zones*, asosiasi bisnis, dan *state-owned enterprises* Oman guna memperoleh *insights* sektoral yang tidak tersedia secara publik.
- memperkuat analisis prospektif sektor prioritas Vision 2040 (hydrogen, mining, logistics, tourism, fisheries) termasuk pemetaan peluang bagi pelaku usaha Indonesia.
- memanfaatkan *templates* dan sistem manajemen data internal untuk menjaga konsistensi kualitas dan ketepatan waktu laporan serta memanfaatkan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 04/B/PR/08/2024/01 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengelolaan *Data Economic Intelligence* Perwakilan Republik Indonesia di Kementerian Luar sebagai acuan.

- Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia
- memastikan keselarasan kebutuhan informasi dengan prioritas diplomasi ekonomi kementerian/lembaga di Indonesia, termasuk agenda promosi perdagangan dan investasi.

B3 Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri KBRI Muscat yang Kuat

Diplomasi Digital adalah diplomasi yang dilakukan dengan mengunakan internet untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Diplomasi digital menawarkan cara baru dalam berkomunikasi dalam mendukung aktivitas diplomasi, baik yang ditujukan kepada pemangku kepentingan, negara lain, serta publik. Diplomasi digital ditujukan dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis informasi-informasi penting untuk mendukung kebijakan luar negeri; mengomunikasikan posisi kebijakan luar negeri; serta melindungi kepentingan negara dan warga negara.

Informasi hubungan luar negeri adalah pemberitahuan, kabar, atau berita tentang hal-hal yang menyangkut aspek regional dan internasional, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.

Kuat berarti memiliki keunggulan, akurat, dan aktual.

Analisis IK B3.1

Persentase Impresi Engagement Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat pada KBRI Muscat

Impresi adalah jumlah akun followers dan non-followers yang melihat suatu postingan di media digital.

Engagement adalah jumlah respons, retweet, share, dan likes terhadap suatu postingan di media digital dan/atau akumulasi press briefing, wawancara, pelaksanaan media gathering, kunjungan jurnalistik, pembuatan film, Journalist Visit Program, pertemuan/kerja sama lainnya dengan media

Media sosial adalah suatu media dalam jaringan (online) di mana penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan suatu informasi.

Media sosial yang diukur meliputi Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube.

Portal berita adalah publikasi berita yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), atau perwakilan diplomatik lainnya di situs web resmi Perwakilan. Publikasi ini disampaikan dalam bahasa setempat atau bahasa Inggris, bertujuan untuk menyampaikan informasi penting terkait aktivitas, layanan, dan perkembangan yang relevan dengan Indonesia kepada masyarakat setempat maupun khalayak internasional.

Media setempat adalah media pemberitaan di negara akreditasi/wilayah kerja. Berita terkait Indonesia yang dipublikasikan di berbagai platform media di negara akreditasi, seperti media cetak, media online, televisi, dan radio. Pemberitaan ini meliputi isu-isu yang terkait dengan Indonesia dan dipromosikan atau didukung oleh Perwakilan RI.

Engagement media setempat meliputi pertemuan berbagai media setempat dan perwakilan untuk menyampaikan informasi atau memberikan penjelasan mengenai suatu isu, kebijakan terkait politik luar negeri RI serta membangun hubungan baik, memperkuat komunikasi, dan berbagi informasi secara langsung.

Kunjungan Jurnalistik adalah kegiatan peliputan yang dilakukan oleh jurnalis media asing dari Perwakilan RI ke Indonesia.

Pembuatan film adalah kegiatan pembuatan film oleh perusahaan asing di wilayah akreditasi/wilayah kerja Perwakilan RI yang mengambil lokasi di wilayah Indonesia.

Journalist Visit Program adalah program yang diinisiasi oleh Perwakilan RI untuk mengundang jurnalis asing datang ke Indoneisa. Tujuan utamanya adalah untuk memperkenalkan potensi Indonesia, baik dari segi pariwisata, budaya, ekonomi, maupun hubungan diplomatik.

Ruang Lingkup:

IK ini diukur melalui penghitungan atas 4 (empat) komponen utama:

1. Impresi dan Engagement Media Sosial Perwakilan dengan bobot: 25%
2. Berita yang diunggah pada Portal Perwakilan dalam Bahasa setempat/Bahasa inggris dengan bobot: 25%
3. Pemberitaan mengenai Indonesia di media setempat dengan bobot: 25%
4. Engagement Perwakilan dengan media setempat (akumulasi press briefing, wawancara, pelaksanaan media gathering, kunjungan jurnalistik, pembuatan film, Journalist Visit Program, pertemuan/kerja sama lainnya dengan media) dengan bobot: 25%

Pada awal tahun saat penetapan target, perwakilan perlu menetapkan proyeksi realisasi dan target setiap komponen pada dokumen pemetaan.

Batasan Waktu:

IK ini dihitung berdasarkan hasil pengukuran selama satu tahun anggaran.

Informasi Kinerja

Tabel III.23

Capaian IK B3.1 Persentase Impresi Engagement Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat pada KBRI Muscat

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai Capaian SUB IK*)	Nilai Bobot **)
Persentase Impresi Engagement Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat pada KBRI Muscat			
Realisasi			**75,00**
Target			**70,00**
Capaian			**107,14**
Batas Toleransi*)** (jika capaian melebihi 120%)			**N/A**

Pada tahun 2025, realisasi IK B3.1 “Persentase Impresi Engagement Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat pada KBRI Muscat” tercatat sebesar 75,00, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 70,00. Dengan demikian, capaian IK mencapai 107,14.

Realisasi IK ini diperoleh dari *engagement* media sosial KBRI Muscat, pemberitaan Indonesia di portal KBRI Muscat dan media setempat, serta *engagement* KBRI Muscat dengan media setempat. Pada tahun 2025, KBRI Muscat telah bekerja sama dengan media setempat untuk memuat kegiatan KBRI Muscat dalam media.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.24

Target, Realisasi, dan Capaian IK Persentase Impresi Engagement Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat pada KBRI Muscat

Kode IK/ SUB IK		2023	2024	2025
C1.1	Target	N/A	N/A	70,00
	Realisasi	N/A	N/A	75,00
	Capaian	N/A	N/A	107,14

Target IK "Persentase Impresi Engagement Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat pada KBRI Muscat" merupakan IK baru yang ditetapkan pada tahun 2025. Target ditetapkan merujuk pada target *cascading* dari Kemlu RI.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Sejumlah program strategis telah dilaksanakan oleh KBRI Muscat sepanjang tahun 2025 dan dalam rangka mendukung realisasi IK B.3.1 untuk mendukung pencapaian engagement media sosial, portal KBRI dan media setempat (lokal, nasional), telah dilaksanakan dengan baik yang memuat semua tugas dan fungsi KBRI Muscat (merangkap Yaman) di fungsi politik, ekonomi , sosial-budaya serta pelindungan WNI di Oman dan Muscat.

Analisis Program yang mendukung Capaian

Kegiatan yang dilaksanakan oleh KBRI Muscat sepanjang tahun 2025 untuk mendukung capaian engagement media sosial, portal berita dan media setempat sebesar 70% antara lain:

1. SDM pengampu medsos KBRI Muscat yang memadai
2. Adanya akses yang baik dengan publik
3. Adanya networking dengan media setempat dan media nasional

Kendala dan Tantangan

Walaupun KBRI Muscat berhasil mencapai target IK B.3.1. pada tahun 2025, namun terdapat tantangan yang tetap harus diperhatikan khususnya update tools/perangkat pendukung pembuatan konten media sosial.

Upaya Perbaikan/Antisipasi

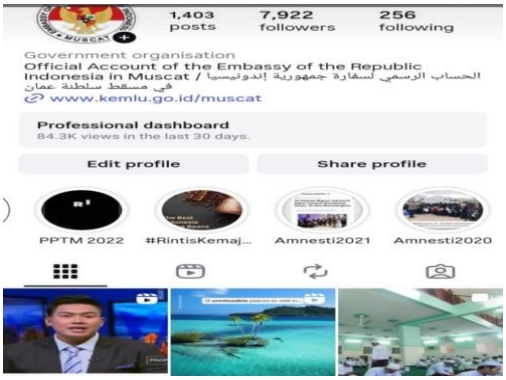
KBRI Muscat perlu melakukan upaya antisipasi untuk mempertahankan capaian IK B.3.1 yaitu:

1. Memperluas networking dengan media setempat dan media nasional

2. Mengupayakan brainstorming guna menggali ide konten informatif dan menarik publik
3. Meningkatkan koordinasi antar fungsi terkait terutama pemberitaan yang akan dibagikan di media sosial, portal KBRI Muscat dan media lainnya

Dokumentasi

Gambar III.16



Engagement Instagram KBRI Muscat

Gambar III.17



Menlu RI bersama Dubes Yaman (Saba News)

Gambar III.18



Wawancara Live CNN Indonesia dengan Dubes RI Muscat merangkap Yaman

Learning and Growth Perspective

L1 Tata Kelola Organisasi KBRI Muscat yang Baik

Definisi:

Organisasi adalah kesatuan bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Tata Kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi.

Analisis IK L1.1

Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Muscat

Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Ruang lingkup:

Sesuai dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian evaluasi AKIP meliputi empat komponen dan bobot sebagai berikut:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Perwakilan RI bertujuan untuk:

a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP di Perwakilan RI;
b. menilai tingkat implementasi SAKIP di Lingkungan Perwakilan RI;
c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP di Lingkungan Perwakilan RI; dan
d. memantau tindak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Perwakilan RI periode sebelumnya.

Klasifikasi Nilai evaluasi AKIP:

(1) AA (Skor > 90-100); Sangat Memuaskan

(2) A (Skor > 80-90); Memuaskan

(3) BB (Skor > 70-80); Sangat Baik

(4) B (Skor > 60-70); Baik

(5) CC (>50-60); Cukup

(6) C (>30-50); Kurang

(7) D (0-30); Sangat Kurang

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja, pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pedoman evaluasi AKIP diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 88 Tahun 2021. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi berfokus pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan.

1) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah

2) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk: a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; b) menilai tingkat implementasi SAKIP; c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Batasan waktu:

Nilai evaluasi AKIP yang digunakan adalah Nilai Evaluasi AKIP tahun berjalan. Apabila belum diperoleh nilai pada tahun berjalan, digunakan penilaian tahun sebelumnya.

Informasi Kinerja

Tabel III.25

Capaian IK L1.1 Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Muscat

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai Capaian SUB IK*)	Nilai Bobot **)
Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Muscat			
Realisasi			**74,20**
Target			**72,25**

Capaian	**102,70**
Batas Toleransi*)** (jika capaian melebihi 120%)	**N/A**

Pada tahun 2025, realisasi IK L1.1 “Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Muscat” tercatat sebesar 74,20, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 72,25. Dengan demikian, capaian IK mencapai 102,70. Penetapan target mempertimbangkan realisasi tahun 2024 yang lebih rendah dari target. Realisasi IK ini diperoleh dari nilai AKIP yang ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal, Kemenlu.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.26

Target, Realisasi, dan Capaian IK Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Muscat

Kode IK/ SUB IK		2023	2024	2025
C1.1	Target	74,32	75,82	72,25
	Realisasi	63,70	70,25	74,20
	Capaian	85,71	92,65	102,70

Penetapan target IK pada tahun 2025 mempertimbangkan realisasi tahun 2024 yang lebih rendah dari target**.** Realisasi IK mengalami kenaikan 74,20 dari sebelumnya 70,25 pada tahun 2024.

Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian IK

Untuk segi perencanaan, dokumen perencanaan KBRI Muscat berupa Renstra 2025-2029, Renja K/L, dan PK telah disusun dan disampaikan tepat waktu. KBRI Muscat juga telah melakukan reviu secara berkala dan targetnya telah dipergunakan untuk mengukur keberhasilan

Dalam hal pengukuran dan pelaporan kinerja, KBRI Muscat telah melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkala. Selain itu, LKj Tahun 2024

telah disusun dan menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU, serta telah disampaikan tepat waktu. KBRI Muscat juga telah melakukan evaluasi atas program secara berkala melalui dialog kinerja secara rutin.

Namun, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu disesuaikan berdasarkan arahan Pusat, terutama dalam hal penyusunan Renstra 2025-2029 agar dikoordinasikan dengan BPO, pelaksanaan dialog kinerja secara berkala, evaluasi terkait capaian IK yang melebihi batas toleransi, perencanaan IK S1.1. dan S1.2. sejak awal.

Analisis Program yang mendukung Capaian

Sejumlah kegiatan telah dilaksanakan oleh KBRI Muscat sepanjang tahun 2025 untuk dapat memperoleh nilai AKIP berdasarkan target, yaitu:

- Penyusunan dokumen perencanaan KBRI Muscat berupa Renstra 2025-2029, Renja K/L, dan PK tahun 2025.
- Evaluasi target dan realisasi kinerja KBRI Muscat selama tahun 2025 melalui dialog kinerja.
- Penyusunan LKj KBRI Muscat periode tahun 2024

Kendala dan Tantangan

Kendala dan tantangan yang dihadapi KBRI Muscat dalam upaya pencapaian target hasil evaluasi AKIP yaitu utamanya dinamika pelaksanaan kegiatan diplomasi yang cukup tinggi termasuk sering terjadinya penyesuaian isu yang harus ditangani termasuk isu nasional dan regional berpengaruh terhadap penyesuaian target/rencana dengan realisasi kinerja.

Upaya Perbaikan

KBRI Muscat senantiasa melakukan koordinasi dengan Kepala Perwakilan dan antar fungi serta Direktorat Timur Tengah untuk melakukan pemetaan realisasi kinerja guna pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun berjalan.

Proyeksi Kedepan

KBRI Muscat akan berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui dialog kinerja antar fungsi berkala terkait pencapaian kinerja serta hambatan dan solusi dalam pencapaian kinerja dimaksud guna evaluasi terhadap penetapan target yang ditentukan.

L2 Pengelolaan Aset KBRI Muscat yang Optimal

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset berupa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berdasar dari perolehan lainnya yang sah.

Cakupan aset yang diukur dalam indeks ini adalah aset lancar berupa barang milik negara (BMN). Sehingga Pengelolaan Aset dimaksud dalam sasaran strategis ini ialah proses perencanaan, pengunaan, pemanfaatan, pemeliharan, penatausahan, pengawasan dan pengendalian BMN yang berada di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Optimal berarti paling baik dan tertinggi.

Ruang lingkup Pengelolaan Aset sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 yaitu kegiatan perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Analisis IK L2.1

Indeks pengelolaan BMN KBRI Muscat

BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Indeks Pengelolaan BMN adalah alat ukur kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang dilaksanakan oleh satker perwakilan sebagai pendukung pengelolaan Aset Kementerian Luar Negeri secara keseluruhan. Implementasi Indeks Pengelolaan BMN merupakan bentuk penguatan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN sebagai upaya Pengelola Barang bersama-sama Pengguna Barang untuk terus menerus melakukan perbaikan tata kelola BMN.

Indeks Pengelolaan BMN mencakup rata-rata tertimbang (weighted average) parameter-parameter pengelolaan BMN yang terdapat pada Perwakilan RI.

Ruang lingkup:

Indeks Pengelolaan BMN mencakup penghitungan dari 8 (delapan) parameter pengelolaan BMN, yaitu:

1. Tindak lanjut temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait BMN pada satuan kerja
2. Realisasi PNBP dari pengelolaan aset satuan kerja
3. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN satuan kerja
4. Asuransi BMN satuan kerja

5. Tindak lanjut pemanfaatan/penggunaan yang menghasilkan PNBP, pemindahtanganan, dan penghapusan BMN satuan kerja
6. Tindak lanjut BMN satuan kerja rusak berat
7. BMN satuan kerja memiliki dokumen kepemilikan
8. Penggunaan BMN satuan kerja yang sesuai ketentuan

Parameter tersebut merujuk komponen penilaian dalam Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang disesuaikan dengan implementasi pengelolaan BMN pada Perwakilan RI. Dalam penghitungan akhir, parameter yang tidak applicable dengan kondisi perwakilan RI dapat tidak diperhitungkan. Sebagai contoh, jika suatu perwakilan RI tidak mempunyai kepemilikan tanah, maka parameter nomor 7 yaitu Tingkat BMN (tanah) yang mempunyai dokumen kepemilikan, tidak diperhitungkan.

Penghitungan Parameter poin 1 adalah sebagai berikut:

- penyelesaian tindak lanjut parameter 100% atau tidak terdapat temuan = indeks 4
- penyelesaian tindak lanjut parameter antara 70% s.d. kurang dari 100% = indeks 3 sampai <4
- penyelesaian tindak lanjut parameter antara 40% s.d. kurang dari 60% = indeks 2 sampai <3
- penyelesaian tindak lanjut parameter di bawah 40% = indeks 1 sampai <2

Penghitungan Parameter poin 2; 5; 7; dan 8 adalah sebagai berikut:

- penyelesaian/pemenuhan parameter lebih dari 80% = indeks 4
- penyelesaian/pemenuhan parameter antara 60% s.d. kurang dari 80% = indeks 3 sampai <4
- penyelesaian/pemenuhan parameter antara 40% s.d. kurang dari 70% = indeks 2 sampai <3
- penyelesaian/pemenuhan parameter di bawah 40% = indeks 1 sampai <2

Penghitungan Parameter poin 3 adalah sebagai berikut:

- penyampaian laporan kurang atau sama dengan H-3 = indeks 4
- penyampaian laporan antara H-5 s.d H-0 = indeks 3
- penyampaian laporan H+1 s.d. H+3 = indeks 2
- penyampaian laporan lebih dari H+3 atau tidak menyampaikan = indeks 1

Penghitungan Parameter poin 4 adalah sebagai berikut:

- penyerahan polis asuransi atau tidak terdapat obyek target asuransi BMN = indeks 4
- kontrak pengadaan asuransi oleh satuan kerja = indeks 3
- penandatanganan Surat Permintaan Asuransi oleh satuan kerja = indeks 2

- penyampaian usulan asuransi atau belum ada kegiatan pengasuransian = indeks 1

Penghitungan Parameter poin 6 adalah sebagai berikut:

- Saldo BMN Rusak Berat periode akhir t-0 > Saldo BMN Rusak Berat periode awal t-0 = Indeks 1
- Saldo BMN Rusak Berat periode akhir t-0 = Saldo BMN Rusak Berat periode awal t-0 = Indeks 2
- Saldo BMN Rusak Berat periode akhir t-0 < Saldo BMN Rusak Berat periode awal t-0 = Indeks 3
- Saldo BMN Rusak Berat periode akhir t-0 = 0 (nihil) = Indeks 4

Informasi Kinerja

Tabel III.27

Capaian IK L2.1 Indeks pengelolaan BMN KBRI Muscat

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai Capaian SUB IK*)	Nilai Bobot **)
Indeks pengelolaan BMN KBRI Muscat			
Realisasi			**3,70**
Target			**3,46**
Capaian			**93,51**
Batas Toleransi*)** (jika capaian melebihi 120%)			**N/A**

Pada tahun 2025, realisasi IK L2.1 “Indeks pengelolaan BMN KBRI Muscat” tercatat sebesar 3,46, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 3,70. Dengan demikian, capaian IK mencapai 93,51.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.28

Target, Realisasi, dan Capaian IK Indeks pengelolaan BMN KBRI Muscat

Kode IK/ SUB IK		2023	2024	2025
C1.1	Target	N/A	3,20	3,70
	Realisasi	N/A	3,65	3,46
	Capaian	N/A	114,06	93,51

Penetapan target IK pada tahun 2025 mengalami kenaikan mempertimbangkan realisasi tahun 2024 yang lebih tinggi dari target**.** Realisasi IK mengalami penurunan 3,46 dari sebelumnya 3,65 pada tahun 2024.

Guna mencapai target nilai IPA KBRI Muscat yang ditetapkan, KBRI Muscat telah melakukan pengelolaan BMN diantaranya dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Perwakilan mengenai Penetapan Status Penggunaan BMN, menyampaikan Laporan Wasdal Semester I dan II TA 2025 menyampaikan Laporan RKBMN serta melaporkan polis asuransi atas BMN di KBRI Muscat.

Namun demikian, terdapat tindak lanjut BPK berupa penghapusan BMN yang masih dilakukan proses tindak lanjut oleh KBRI Muscat sehingga belum dapat dijadikan faktor penambah penilaian pada tahun ini.

L3 Pengelolaan Anggaran KBRI Muscat yang Optimal dan Akuntabel

Keberadaan infrastruktur diplomasi yang kuat juga ditopang oleh Pengelolaan Anggaran yang optimal dan akuntabel. Dalam hal ini pengelolaan anggaran meluputi pengelolaan dimulai dari penyusunan rencana kerja, penuangannya dalam dokumen pelaksanaan anggaran, pengawasan atas realisasinya, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintah, dan penyusunan Laporan Keuangan.

Optimal berarti paling baik dan tertinggi

Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan

Ruang lingkup:

Anggaran yang Optimal dicapai dengan penyerapan anggaran yang maksimal serta terpenuhinya target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Analisis IK L3.1

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KBRI Muscat

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan dapat diakses melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Anggaran Perbendaharaan Negara (OMSPAN). Penilaian IKPA merujuk pada PMK No. 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja K/L untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Terdapat 3 (tiga) aspek penilaian dalam IKPA yaitu (1) kualitas perencanaan anggaran (20%), kualitas pelaksanaan anggaran (55%) dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran 25 %. Sesuai Reformulasi IKPA Tahun 2022, terdapat 6 (enam) Indikator Penilaian IKPA yang dihitung pada Perwakilan RI dengan bobot presentasenya sebagai berkut:

1. Revisi DIPA (10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (10%)
3. Penyerapan Anggaran (20%)
4. Pengelolaan UP/TUP (10%)
5. Dispensasi SPM (5%)
6. Capaian Output (25%)

Nilai IKPA diperoleh dari aplikasi OMSPAN Kemenkeu.

Batasan waktu :

Nilai IKPA Triwulanan diambil setiap tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir, atau menyesuaikan waktu diterimanya IKPA dari Kementerian Keuangan.

Nilai IKPA Tahunan diambil setiap tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan IV berakhir, atau menyesuaikan waktu diterimanya IKPA dari Kementerian Keuangan.

Informasi Kinerja

Tabel III.29

Capaian IK L3.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KBRI Muscat

Indikator Kinerja	Informasi Kinerja	Nilai Capaian SUB IK*)	Nilai Bobot **)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KBRI Muscat			
Realisasi			**99,52**
Target			**93,20**
Capaian			**106,78**
Batas Toleransi*)** (jika capaian melebihi 120%)			**N/A**

Pada tahun 2025, realisasi IK L3.1 “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KBRI Muscat” tercatat sebesar 99,52, dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 93,20. Dengan demikian, capaian IK mencapai 106,78.

Perbandingan Kinerja

Tabel III.30

Target, Realisasi, dan Capaian IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KBRI Muscat

Kode IK/ SUB IK		2023	2024	2025
C1.1	Target	93,00	93,00	93,20
	Realisasi	90,24	93,20	99,52
	Capaian	97,03	100,22	106,78

Penetapan target IK pada tahun 2025 mengalami kenaikan mempertimbangkan realisasi tahun 2024 yang lebih tinggi dari target**.** Realisasi IK mengalami kenaikan 99,52 dari sebelumnya 93,20 pada tahun 2024.

Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan KBRI Muscat guna meningkatkan nilai IKPA di tahun berikutnya adalah:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan
2. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan
3. Melakukan akselerasi program kegiatan
4. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
5. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja
6. Meningkatkan monitoring dan evaluasi

Efisiensi Sumber Daya Manusia

Untuk mendorong efisiensi dan efektivitas sumber daya manusia dalam pencapaian kinerja, KBRI Muscat telah menyempurnakan penjabaran kinerja yang menggambarkan kerangka logis pencapaian target hingga ke level individu. Penjabaran ini dituangkan dalam pembagian peran hasil bagi setiap pegawai, yang menjadi acuan dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan, KBRI Muscat juga fokus pada pengelolaan sumber daya manusia yang efisien. Langkah-langkah strategis telah diambil untuk mendukung tujuan organisasi diantaranya sebagai berikut :

1. **Penempatan Pegawai yang Tepat**: Memastikan pegawai ditempatkan sesuai kebutuhan KBRI Muscat dengan mempertimbangkan kompetensi dan latar belakang pendidikan pegawai agar sesuai dengan tugas yang diemban.
2. **Penyederhanaan Birokrasi:** Mengkaji ulang struktur organisasi untuk memastikan bahwa setiap jabatan memiliki tanggung jawab yang jelas dan tidak terjadi tumpang tindih fungsi.
3. **Pelatihan dan Sertifikasi**: Menyelenggarakan pelatihan daring untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
4. **Monitoring dan Evaluasi Kinerja :** Melaksanakan Dialog Kinerja secara berkala terhadap kinerja pegawai, untuk memberikan umpan balik dan mengidentifikasi potensi pengembangan.

Tabel III.31
Pemenuhan Formasi Pegawai berdasarkan kebutuhan Organisasi

Perwakilan RI	Kebutuhan	Pemenuhan
Home Staff		
Diplomat	8	8
Penata Kanselerai	1	1
Pranata Informasi Diplomatik	1	1
Pegawai Setempat		
Pegawai Setempat	12	10
Total	24	22

Saat ini tugas dan fungsi KBRI Muscat di Oman merangkap tugas dan fungsi di Yaman. Komposisi pegawai pada Tahun 2025 KBRI Muscat untuk *Home Staff* telah sesuai dengan kebutuhan dan pemenuhan dalam pelaksanaan tugas, Namun demikian komposisi kebutuhan Pegawai Setempat belum memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas sehingga masih terdapat kekurangan sumber daya manusia pada fungsi-fungsi terkait.

Menindaklanjuti kekurangan Pegawai Setempat dimaksud KBRI Muscat akan berkoordinasi dengan Pihak-Pihak terkait di Pusat terkait pengusulan penambahan formasi Pegawai Setempat khususnya setelah KBRI Muscat merangkap Yaman.

Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Penggunaan sarana dan prasarana KBRI Muscat terkait erat dengan penerapan good governance dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). KBRI Muscat telah melakukan pengelolaan sarana dan prasarana yang akuntabel dan produktif. Pengadaan BMN pada tahun 2025 dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, yang terbagi dalam dua jenis barang, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel.

Dalam mengelola BMN, Indikator Kinerja Pengelolaan BMN (IPA) digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kualitas pengelolaan BMN di seluruh K/L, termasuk Kemenlu. Pengukuran IPA telah dimulai sejak tahun 2021 dan merupakan upaya untuk memperkuat pengawasan serta pengendalian pengelolaan BMN.

Pada tahun 2024, Kemenlu memperoleh nilai IPA sebesar 3,10, sedangkan nilai untuk tahun 2025 belum diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Dengan diterapkannya Indeks Pengelolaan Aset sebagai Indikator Kinerja Pengelolaan BMN di Kemenlu, hasil pengukuran ini menjadi bahan penting untuk monitoring dan evaluasi. Data ini bermanfaat bagi pengelola barang dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan terkait tata kelola BMN. Selain itu, hasil ini juga berfungsi sebagai upaya perbaikan dalam penatausahaan dan pengelolaan BMN yang berkelanjutan.

Kualitas pengelolaan sarana dan prasarana yang akuntabel dan produktif menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dalam Program dan Sasaran Strategis selama tahun 2025. Dengan demikian, pengelolaan BMN yang efektif dan efisien akan mendukung pencapaian tujuan organisasi serta optimalisasi penggunaan sumber daya.

Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Kinerja Kemenlu

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, KBRI Muscat memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada para pemangku kepentingan. Inovasi di bidang teknologi informasi tidak hanya memberikan kesempatan bagi KBRI Muscat untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya.

Pemanfaatan SPBE meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, teknologi informasi juga berfungsi untuk menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan, seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme, melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Dengan menggunakan teknologi, Kemenlu dapat merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat dan tepat.

Beberapa aplikasi yang dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja dan untuk meningkatkan kualitas layanan antara lain:

1. **Layanan Portal “Peduli WNI”:** Aplikasi ini digunakan untuk melaporkan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, serta meningkatkan jangkauan layanan bagi WNI.
2. **Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi “AKSI”:** Aplikasi ini memudahkan proses pengelolaan kinerja organisasi dengan menyediakan data yang akurat dan real-time untuk pengambilan keputusan.
3. **Layanan Monitoring & Evaluasi (E-Monev Bappenas)**: Aplikasi ini memudahkan pelacakan realisasi anggaran, fisik, dan capaian target program (output/outcome) kementerian/lembaga.

4. **Layanan Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA):** Aplikasi ini mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja pemerintah secara *real-time* untuk menciptakan efektivitas dan transparansi, khususnya dalam menyusun Renja K/L dan DAK.
5. **Layanan Akuntabilitas Kinerja Individu "e-Kinerja BKN":** Aplikasi ini mendukung perencanaan dan evaluasi kinerja pegawai, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja individu di lingkungan Kemenlu.
6. **Layanan Kepegawaian (SIMSDM):** Aplikasi ini memudahkan pengelolaan data kepegawaian, sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien.
7. **Layanan Keuangan dan Penganggaran (SAKTI):** Sistem ini mempermudah pengelolaan keuangan Kemenlu dengan memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses keuangan dan penganggaran.
8. **Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE):** Aplikasi ini mempercepat dan mempermudah proses pengadaan barang dan jasa, sekaligus mengurangi potensi penyalahgunaan dalam pengadaan.
9. **Layanan Keuangan dan Penganggaran (SIMKEU):** Sistem ini mempermudah pengelolaan keuangan Kemenlu dengan memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses keuangan dan penganggaran.
10. **Layanan Keuangan dan Penganggaran (MyIntress-My Integrated Treasury System**): Platform digital terintegrasi dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu untuk memonitor transaksi APBN, yang menggabungkan fitur OMSPAN dan MonSAKTI menjadi satu sumber data tunggal (*single source of truth*). Aplikasi ini mempermudah Satuan Kerja (Satker) dan KPPN dalam memantau realisasi anggaran, bendahara, hingga laporan keuangan secara *real-time*.
11. **Layanan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G-3)**: Aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan penerimaan negara (pajak, bea cukai, PNBP) yang lebih cepat dan akurat untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi setoran kas negara.
12. **Layanan Verifikasi Keuangan (NHV Online):** Aplikasi ini memudahkan pencatatan jawaban nota hasil verifikasi terhadap keuangan KBRI Muscat.
13. **Layanan Pengelolaan PNBP (SIMPONI):** aplikasi ini memfasilitasi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara online, sehingga proses pengelolaan PNBP lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
14. **Layanan Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN):** aplikasi ini menggabungkan seluruh siklus pengelolaan keuangan negara, dari perencanaan hingga penyusunan laporan keuangan pusat, sehingga memudahkan satker untuk memantau realisasi anggaran secara *real-time.*
15. **Layanan Pengelolaan BMN (SIMAN):** Aplikasi memudahkan pendataan Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola KBRI, dengan menyediakan data yang akurat dan real-time.

16. **Layanan Administrasi (e-BPPA)** : Aplikasi ini memudahkan pencatatan dan pengajuan biaya bantuan pendidikan anak bagi pegawai Kemenlu yang bertugas di Perwakilan, sehingga proses lebih transparan, efektif dan efisien.
17. **Layanan Perpajakan (Coretax)**: Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan dalam satu platform digital untuk meningkatkan transparansi, efisiensi administrasi, dan kepatuhan sukarela wajib pajak.
18. **Layanan Pemberitaan (SIMBRA)**: Aplikasi ini memudahkan pencatatan, distribusi, dan pelacakan penyampaian berita baik internal Kemenlu maupun dengan K/L/I lainnya, sehingga dapat dilakukan secara lebih cepat, tercatat, dan efisien.
19. **Layanan e-Mail (Mail Kemlu):** Aplikasi e-Mail yang dikelola Kemenlu dan digunakan dalam berkorespondensi dengan counterpart KBRI Muscat.
20. **Layanan Cloud (Kemlu Drive & Cloud Kemlu):** Aplikasi ini digunakan untuk menyimpan Data/File pada media penyimpanan Online yang dikelola langsung oleh Kemenlu.
21. **Office Management System (OMS):** Dashboard yang menampilkan aplikasi-aplikasi terpusat yang dikelola Kemenlu sehingga akses terhadap aplikasi terkait dapat dilakukan secara lebih efisien.
22. **Layanan Aplikasi Persuratan dan Fitur Generate SPT (SIMNADIN):** Aplikasi ini memudahkan dalam pencatatan naskah dinas dan penerbitan SPT, sehingga proses administrasi KBRI Muscat lebih efektif dan efisien.

Dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, KBRI Muscat tidak hanya meningkatkan kualitas layanan publik tetapi juga memperkuat integritas dalam setiap aspek pengelolaan dan pemerintahan. Transformasi digital ini menjadi langkah strategis untuk mencapai tujuan organisasi, mempercepat proses administrasi, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

BAB IV
PENUTUP









BAB IV PENUTUP

IV.1 Simpulan Umum Capaian Kinerja

Pada tahun 2025, KBRI Muscat telah melaksanakan upaya perwujudan tujuan yang tertera pada Rencana Strategis KBRI Muscat 2025-2029 melalui capaian kinerja bagi masing-masing indikator kinerja. Capaian KBRI Muscat selama tahun 2025 dapat berdampak pada kemitraan ekonomi, peningkatan kualitas dan pelindungan WNI, peningkatan keterlibatan aktif diaspora, serta memperkuat postur diplomasi.

Nilai capaian kinerja KBRI Muscat pada tahun 2025 sebesar 104,02 yang didapat dari nilai masing-masing perspektif, dengan rincian sebagai berikut:

1. **S1. Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi KBRI Muscat yang Optimal dengan capaian 110,21** dilengkapi oleh S1.1. Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan dengan negara akreditasi KBRI Muscat dengan capaian 113,90; S1.2. Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi dengan negara akreditasi KBRI Muscat dengan capaian 113,64; dan S1.3. Tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor pariwisata dengan negara akreditasi KBRI Muscat dengan capaian 103,09.
2. **S2. Citra Positif Indonesia di Negara Akreditasi KBRI Muscat yang meningkat dengan capaian 108,78** dilengkapi oleh S2.1. Indeks Citra Indonesia di negara akreditasi KBRI Muscat dengan capaian 108,78.
3. **C1. Pelindungan WNI dan pelayanan publik KBRI Muscat yang prima dengan capaian 103,70** dilengkapi oleh C1.1. Persentase kasus WNI di negara akreditasi KBRI Muscat yang diselesaikan dengan capaian 111,11; C1.2. Nilai persepsi kepuasaan pelayanan kekonsuleran KBRI Muscat dengan capaian 100,00; dan C1.3. Nilai persepsi pelayanan pelindungan WNI KBRI Muscat dengan capaian 100,00.
4. **B1. Diplomasi Bilateral di Negara Akreditasi KBRI Muscat yang Kuat dengan capaian 100,00** dilengkapi oleh B1.1. Jumlah kesepakatan yang dihasilkan dengan negara akreditasi KBRI Muscat dengan capaian 100,00 dan B1.2. Jumlah analisis potensi ekonomi tematik yang dimanfaatkan pemangku kepentingan dengan capaian 100,00.
5. **B2. Basis Data KBRI Muscat yang Akurat dengan capaian 100,76** dilengkapi oleh B2.1. Persentase WNI di negara akreditasi KBRI Muscat yang terverifikasi di Portal Peduli WNI dengan capaian 100,00 dan B2.2. Nilai laporan data Economic Intelligence/Market Intelligence tentang negara akreditasi KBRI Muscat dengan capaian 102,20.
6. **B3. Diplomasi Digital dan Informasi Hubungan Luar Negeri KBRI Muscat yang Kuat dengan capaian 107,14** dilengkapi oleh B3.1 Persentase Impresi Engagement Media Sosial, Portal Berita dan Media Setempat pada KBRI Muscat dengan capaian 107,14.

7. **L1. Tata Kelola Organisasi KBRI Muscat yang Baik dengan capaian 102,70** dilengkapi oleh L1.1. Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KBRI Muscat dengan capaian 102,70.
8. **L2. Pengelolaan Aset KBRI Muscat yang Optimal dengan capaian 93,51** dilengkapi oleh L2.1. Indeks Pengelolaaan BMN KBRI Muscat dengan capaian 93,21.
9. **L3. Pengelolaan Anggaran KBRI Muscat yang Optimal dan Akuntabel dengan capaian 106,78** dilengkapi oleh L3.1. Nilai IKPA KBRI Muscat dengan capaian 106,78.

Memperhatikan capaian tersebut, nilai capaian kinerja KBRI Muscat yaitu 104,18 mendapatkan predikat Istimewa.

IV.2 Kendala – Kendala Utama yang Dihadapi

Selama tahun 2025, KBRI Muscat menghadapi sejumlah kendala dan tantangan dalam menghadapi target kinerja, yaitu:

1. Semakin banyaknya jumlah PMI yang bekerja di Oman khususnya di sektor domestik karena Pemerintah Oman telah membuka akses pengajuan permohonan izin kerja domestik. Selain itu, kurangnya pemahaman PMI terhadap prosedur keimigrasian dan ketenagakerjaan yang berlaku di Oman.

2. Kondisi keamanan yang tidak kondusif akibat eskalasi konflik pada tahun 2025, khususnya di Yaman Utara dan Yaman Selatan, membutuhkan perhatian khusus terutama terkait pelindungan WNI.

3. Minimnya jumlah pegawai setempat KBRI Muscat khususnya mengingat KBRI Muscat tidak hanya menangani Oman, namun juga Yaman sebagai negara akreditasi, terutama dengan semakin banyaknya jumlah PMI di Oman dan pelajar di Yaman.

4. Pelaksanaan berbagai survei sulit dilakukan mengingat sulitnya menjaring responden yang bersedia untuk mengisi survei.

IV.3 Langkah di Masa Mendatang untuk Peningkatan Kinerja

1. KBRI Muscat akan meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait yaitu Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, serta K/L lainnya di Oman dan Yaman.
2. KBRI Muscat akan mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan sosialisasi pelayanan kekonsuleran dan pelindungan WNI ke berbagai kota di Oman dan Yaman.
3. KBRI Muscat akan berkoordinasi dengan Pusat terkait kemungkinan perekrutan dan penambahan jumlah pegawai setempat di KBRI Muscat.
4. KBRI Muscat akan senantiasa melakukan berbagai kegiatan promosi perdagangan, investasi, pariwisata, dan kebudayaan Indonesia untuk mempertahankan dan meningkatan citra positif Indonesia di Oman dan Yaman.